

## **BAB IV**

### **PENGAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM**

Bab ini berisi; (1) penyepakatan isu prioritas di Kabupaten Temanggung, (2) penjelasan isu pembangunan berkelanjutan prioritas Kabupaten Temanggung, dan (3) pengkajian dan analisis dampak/risiko lingkungan. Isu prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung dihasilkan melalui proses konsultasi publik. Selain itu, Bab ini juga menyajikan data dasar atau penjelasan dari masing-masing isu prioritas. Penjelasan atau baseline data merupakan sintesis dari berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai sumber data (pemerintah daerah, LSM, media massa, hasil kajian, website, dan lain sebagainya) yang dikumpulkan oleh POKJA KLHS. Penjelasan isu pembangunan berkelanjutan prioritas atau baseline data ini pada tahap berikutnya akan dipakai sebagai dasar kajian pengaruh pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan pengkajian dan analisis dampak dan risiko lingkungan.

#### **4.1 Penentuan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung**

##### **4.1.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung**

Identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung menggunakan metode FGD atau curah pendapat dan dilakukan oleh POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung sehingga menghasilkan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan. Jumlah isu pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan adalah sebanyak 56 isu pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung dengan didampingi pendamping melakukan pemusatan isu pembangunan berkelanjutan. Pemusatan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kesamaan substansial dan/atau *menelaah* sebab akibat dan diperoleh hasil sebanyak 10 kategori. Seperti di perlihatkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1.

## Isu Pembangunan Berkelanjutan

NO	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	KATEGORISASI ISU
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Bidang Pendidikan
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	
3.	Angka Harapan Hidup / AHH (Tahun)	Bidang Kesehatan
4.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
5.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	
6.	Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan)	
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	<i>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>
8	Angka Kriminalitas	Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
9	Cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran masih sangat rendah	
	Peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	
10	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Bidang Sosial
11	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	
12	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
15	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	
16	Skor Pola Pangan Harapan	Bidang Pangan
17	Fasilitasi pertanahan	Bidang Pertanahan
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup
19	Sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir masih sangat rendah	
20	Meningkatnya pencemaran lingkungan air, udara (tutupan	

	vegetasi/lahan)	
21	Indeks Infrastruktur masih rendah	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Masih relative tingginya bangunan yang belum ber IMB	
	Perlunya pengendalian penataan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya	
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan	Bidang Tenaga Kerja
23	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
24	Prosentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.EI)	
25	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
27	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi	Bidang Perhubungan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas	
28	Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika
29	Desa Terhubung Internet	
	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public berbasis teknologi informasi	
	Belum optimalnya integrasi system informasi daerah yang tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan	
30	Persentase koperasi aktif	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
31	Persentase UKM aktif	
	Belum optimalnya peran koperasi sebagai pelaku sektor riil	
	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM	
32	Laju Investasi	<i>Bidang Penanaman Modal</i>
33	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	<i>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>
34	Presentase prestasi olah raga	
35	Ketersediaan dan keakuratan data makro dan mikro daerah	<i>Bidang Statistik</i>

36	Persandian dan keamanan informasi	<i>Bidang Persandian</i>
37	Pelestarian cagar budaya	<i>Bidang Kebudayaan</i>
38	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	<i>Bidang Perpustakaan</i>
	Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi)	
39	Penerapan arsip secara baku	<i>Bidang Kearsipan</i>
40	Tingkat konsumsi ikan	<i>Bidang Kelautan dan Perikanan</i>
41	Pertumbuhan jumlah wisatawan	<i>Bidang Pariwisata</i>
42	Length of stay (lama tinggal wisatawan)	
43	Produktifitas Komoditas Unggulan	<i>Bidang Pertanian</i>
44	Produktifitas Ternak Sapi	
45	Produktifitas Ternak Ayam Pedaging	
	Belum optimalnya pemasaran produk pertanian	
	Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas	
46	Kontribusi sektor perdagangan	<i>Bidang Perdagangan</i>
	Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan	
47	Kontribusi sektor perindustrian	<i>Bidang Perindustrian</i>
	Perlunya peningkatan nilai tambah komoditas pertanian unggulan di sektor industri	
48	Perlunya mengoptimalkan integrasi sistem e-planning dan e-budgetting	<i>Bidang Perencanaan</i>
	Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan	
49	Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan	<i>Bidang Penelitian dan Pengembangan</i>
	Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan	
50	Rasio ASN di Kabupaten Temanggung yang mengikuti diklat masih rendah	<i>Bidang Kepegawaian</i>
51	Belum optimalnya rasio ASN dan	

	beban kerja	
52	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Temanggung masih rendah	<i>Bidang Keuangan</i>
53	belum semua aparatur pemeriksa bersertifikasi dan jumlah auditor yang masih sedikit	<i>Bidang Pengawasan</i>
54	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017 mendapatkan nilai CC	<i>Bidang Lainnya</i>
55	RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA tepat waktu sesuai prolegda	
56	Pengesahan Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Prolegda pada setiap tahunnya	
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas fasilitas publik	
	Belum optimalnya bisnis proses birokrasi pelayanan publik	

Sumber : Hasil Analisis, 2018

#### **4.1.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Kabupaten Temanggung**

Dari 56 isu pembangunan yang kemudian dikategorikan menjadi 10 kategori isu kembali dilakukan penapisan dengan menggunakan kriteria strategis (berdampak jangka panjang, dampak kumulatif, lintas wilayah, lintas sektor, lintas pemangku kepentingan) mengacu pada Permendagri 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Teknik analisis menggunakan tabel matrik silang antar isu pembangunan berkelanjutan terhadap kriteria strategis dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. Hasil penapisan dari 34 kategori dengan 56 isu pembangunan berkelanjutan menjadi 10 kategori dan 54 isu pembangunan berkelanjutan.

Oleh POKJA PL, 10 kategori dan 54 isu pembangunan berkelanjutan selanjutnya didiskusikan lagi dalam forum Pokja PL disepakati dari 10 kategori menjadi 5 kategori isu pembangunan berkelanjutan yang kemudian disebut isu pembangunan berkelanjutan strategis, seperti pada Tabel 4.2.; Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.2 Hasil Skoring Terhadap Kriteria Strategis

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kriteria Strategis					Total
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif	
1	Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun (baru mencapai SMP kelas 1)	0	v	V	V	v	4
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun (baru mencapai SMP kelas 1)	0	v	V	V	v	4
2	Kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) 12,07 tahun (mencapai kelas 2 SMA)	0	v	V	V	v	4
		Angka Harapan Hidup (Tahun) 75,42 tahun harus dipertahankan karena IPM kategori sedang	V	V	V	V	V	5
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup masih relatif tinggi	V	V	V	V	V	5
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup masih tergolong tinggi di atas standar SDG's	V	V	V	V	V	5
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan) masih berada di bawah target nasional (kurang dari 5%)	V	V	V	V	V	5
		Indeks Infrastruktur masih rendah	V	V	V	V	V	5

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kriteria Strategis					Total
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	V	V	V	V	V	5
5	Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Angka Kriminalitas	V	v	v	v	v	5
		Cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran masih sangat rendah	0	0	V	V	0	2
6	Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	V	V	V	V	V	5
		Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	V	V	V	V	V	5
		Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	V	V	V	V	V	5
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0	0	V	V	0	2
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	0	0	V	V	0	2
		Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	0	V	V	0	2
8	Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	0	V	V	V	V	4
9	Pertanahan	Fasilitasi pertanahan	0	V	V	V	V	4
10	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	V	v	v	v	v	5

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kriteria Strategis					Total
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif	
		Hidup						
		Sampah yang terolah ke Tempat Pembuangan Akhir masih sangat rendah	V	v	v	v	v	5
		Rendahnya kualitas air,	V	v	v	v	v	5
		Jumlah tutupan lahan yang masih rendah	V	v	v	v	v	5
11	Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan	V	v	v	v	v	5
12	Kependudukan Dan Catatan Sipil	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga	V	v	v	v	v	5
		Prosentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.EI)	V	v	v	v	v	5
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	V	v	v	v	v	5
		Laju Pertumbuhan Penduduk	V	v	v	v	v	5
13	Perhubungan	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi						
14	Komunikasi Dan Informasi	Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	V	V	V	V	V	5
		Desa Terhubung Internet	0	0	0	V	V	2
15	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi aktif	0	0	0	V	V	2
		Persentase UKM aktif	0	0	0	V	V	2
16	<i>Bidang Penanaman Modal</i>	Laju Investasi	0	0	0	V	V	2
17	<i>Bidang Kepemudaan</i>	Persentase organisasi	0	0	0	V	V	2



No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kriteria Strategis					Total
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif	
	<i>dan Olahraga</i>	kepemudaan yang aktif						
		Presentase prestasi olah raga	0	0	0	V	V	2
18	<i>Bidang Statistik</i>	Ketersediaan dan keakuratan data makro dan mikro daerah	0	0	0	V	V	2
19	<i>Bidang Persandian</i>	Persandian dan keamanan informasi	0	0	0	V	V	2
20	<i>Bidang Kebudayaan</i>	Pelestarian cagar budaya	0	0	0	V	V	2
21	<i>Bidang Perpustakaan</i>	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	0	0	0	V	V	2
22	<i>Bidang Kearsipan</i>	Penerapan arsip secara baku	0	0	0	V	V	2
23	<i>Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	Tingkat konsumsi ikan	0	0	0	V	V	2
24	<i>Bidang Pariwisata</i>	Pertumbuhan jumlah dan lama tinggal wisatawan	0	0	0	V	V	2
25	<i>Bidang Pertanian</i>	Produktifitas Komoditas Unggulan	0	0	V	V	V	3
		Produktifitas Ternak Sapi	0	0	V	V	V	3
		Produktifitas Ternak Ayam Pedaging	0	0	V	V	V	3
26	<i>Bidang Perdagangan</i>	Kontribusi sektor perdagangan	0	0	V	V	V	3
27	<i>Bidang Perindustrian</i>	Kontribusi sektor perindustrian	V	0	V	V	V	4
28	<i>Bidang Perencanaan</i>	Tingkat konsistensi program dan kegiatan pembangunan daerah	V	0	V	V	V	4

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kriteria Strategis					Total
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang	Dampak Kumulatif	
29	<i>Bidang Penelitian dan Pengembangan</i>	Di Kabupaten Temanggung masih ada hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan	V	0	V	V	V	4
30	<i>Bidang Kepegawaian</i>	ASN di Kabupaten Temanggung belum semuanya mengikuti diklat	0	0	V	V	V	3

**Tabel 4.3.**  
**Kategorisasi Ulang Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis**

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kategorisasi Ulang
1	PENDIDIKAN	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun (baru mencapai SMP kelas 1) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun (baru mencapai SMP kelas 1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 12,07 tahun ( mencapai kelas 2 SMA)	
2	KESEHATAN	Angka Harapan Hidup (Tahun) 75,42 tahun harus dipertahankan karena IPM kategori sedang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup masih relatif tinggi	
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup masih tergolong tinggi di atas standar SDG's	
		Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan) masih berada di bawah target nasional (kurang dari 5%)	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur masih rendah	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	Kemiskinan
5	Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Kemiskinan
		Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	
		Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
6	PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
7	PERTANAHAN	Fasilitasi pertanahan	
8	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sampah yang terolah ke Tempat Pembuangan Akhir masih sangat rendah	Meningkatnya skor indeks kepuasan masyarakat
		Rendahnya indeks kualitas lingkungan air, udara, tutupan	

		lahan, dan sampah perkotaan	
9	TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga Prosentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.EI) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya skor indeks kepuasan masyarakat
11	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Desa Terhubung Internet	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
12	<i>Bidang Penanaman Modal</i>	Laju Investasi	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
13	<i>Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	Tingkat konsumsi ikan	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
14	<i>Bidang Pariwisata</i>	Pertumbuhan jumlah wisatawan Length of stay (lama tinggal wisatawan)	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
15	<i>Bidang Pertanian</i>	Produktifitas Komoditas Unggulan Produktifitas Ternak Sapi Produktifitas Ternak Ayam Pedaging	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
16	<i>Bidang Perdagangan</i>	Kontribusi sektor perdagangan	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
17	<i>Bidang Perindustrian</i>	Kontribusi sektor perindustrian	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
18	<i>Bidang Perencanaan</i>	Tingkat konsistensi program dan kegiatan pembangunan daerah	Reformasi birokrasi
19	<i>Bidang Kepegawaian</i>	ASN di Kabupaten Temanggung belum semuanya mengikuti diklat	Reformasi birokrasi

Tabel 4.4 Hasil Skoring Terhadap Kriteria Strategis

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kriteria Strategis				Total	
			Lintas Wilayah	Lintas Sektor	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang		Dampak Kumulatif
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun (baru mencapai SMP kelas 1) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun (baru mencapai SMP kelas 1)	0	v	v	v	v	4
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 12,07 tahun (mencapai kelas 2 SMA)	0	v	v	v	v	4
		Angka Harapan Hidup (Tahun) 75,42 tahun harus dipertahankan karena IPM kategori sedang	v	v	v	v	v	5
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup masih relatif tinggi	v	v	v	v	v	5
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup masih tergolong tinggi di atas standar SDG's	v	v	v	v	v	5
		Persentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan) masih berada di bawah target nasional (kurang dari 5%)	v	v	v	v	v	5
2	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja	Indeks Infrastruktur masih rendah	v	v	v	v	v	5
		Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	v	v	v	v	v	5
		Skor Pola Pangan Harapan	0	v	v	v	v	4
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan	v	v	v	v	v	5
		Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik	v	v	v	v	v	5
		Desa Terhubung Internet	0	0	0	v	v	2
		Laju Investasi	0	0	0	v	v	2
		Tingkat konsumsi ikan	0	0	0	v	v	2
		Pertumbuhan jumlah dan Length of stay (lama tinggal wisatawan)	0	0	0	v	v	2
		Produktifitas Komoditas Unggulan	0	0	v	v	v	3
		Produktifitas Ternak Sapi	0	0	v	v	v	3
		Produktifitas Ternak Ayam Pedaging	0	0	v	v	v	3

No	Tema Isu Pembangunan Berkelanjutan	Isu-Isu Terkait	Kriteria Strategis				Total	
			Lintas Wilayah	Lintas Sektoral	Lintas Pemangku Kepentingan	Dampak Jangka Panjang		Dampak Kumulatif
		Kontribusi sektor perdagangan	0	0	v	v	v	3
		Kontribusi sektor perindustrian	v	0	v	v	v	4
3	Kemiskinan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	v	v	v	v	v	5
		Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	v	v	v	v	v	5
4	Meningkatnya skor indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	5
		Sampah yang terolah ke Tempat Pembuangan Akhir masih sangat rendah	v	v	v	v	v	5
		Rendahnya indeks kualitas lingkungan air, udara, tutupan lahan, dan sampah perkotaan	v	v	v	v	v	5
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	v	v	v	v	v	5
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.EI)	v	v	v	v	v	5
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	v	v	v	v	v	5
		Laju Pertumbuhan Penduduk	v	v	v	v	v	5
5	Reformasi birokrasi	Tingkat konsistensi program dan kegiatan pembangunan daerah	v	0	v	v	v	4
		Di Kabupaten Temanggung masih ada hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan	v	0	v	v	v	4
		ASN di Kabupaten Temanggung belum semuanya mengikuti diklat	0	0	v	v	v	3

Selanjutnya untuk mendapatkan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis digunakan pasal 9 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, terkait dengan; (1) karakteristik wilayah; (2) Tingkat pentingnya potensi dampak; (3) Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan; (4) Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP); (5) Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan (6) Hasil KLHS dari KRP pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. Dengan menggunakan teknik analisis tabel matrik silang antar isu pembangunan berkelanjutan strategis dengan kriteria paling strategis (pasal 9 ayat (1), PP No. 46 Tahun 2016).Hasilnya diperoleh gambaran keterkaitan antara isu pembangunan berkelanjutan strategis dengan kriteria paling strategis, seperti diperlihatkan pada tabel 4.5.berikut di bawah ini

Tabel 4.5. Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis

No	Tema isu pembangunan berkelanjutan	Pasal 9 ayat (1)						
		Karakteristik Wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar Isu PB	Keterkaitan dengan materi muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS hirarki di atas	Hasil KLHS wilayah berdekatan
		RBI						
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Di wilayah Kabupaten Temanggung	Sangat penting. Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal masyarakat yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	IPM Kabupaten temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kamajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.	Terkait IPM, Kab. Temanggung berhubungan dengan misi RPJMD Kabupaten bahwa hendak Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. Salah satunya melalui peningkatan SDM melalui pendidikan, dimana dalam IPM yaitu angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah masih rendah degan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah	Belum ada	Isu PB KLHS RPJMD Kab. Temanggung memiliki keterkaitan atau relevansi langsung dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sebab	Tidak ada



No	Tema isu pembangunan berkelanjutan	Pasal 9 ayat (1)						
		Karakteristik Wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar Isu PB	Keterkaitan dengan materi muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS hirarki di atas	Hasil KLHS wilayah berdekatan
		RBI						
2	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja	Di wilayah Kabupaten Temanggung	Sangat penting. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah di Kabupaten Temanggung masih belum optimal, sehingga upaya pemberdayaan ekonomi kreatif harus mulai diperhatikan.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah tersebut tercermin pada naiknya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, produktifitas pertanian dan peternakan, serta kompetensi tenaga kerja; meningkatnya infrastruktur kondisi jalan, jembatan, jaringan irigasi, jaringan teknologi informasi dan kesiapan desa rawan bencana; menurunnya inflasi dan tingkat pengangguran terbuka; begitu juga tercermin dari angka lama tinggal wisatawan.	berhubungan dengan misi RPJMD Kabupaten bahwa hendak Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah. Tujuannya untuk memutus rantai lingkaran kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat.	Belum ada	Isu PB KLHS RPJMD Kab. Temanggung memiliki keterkaitan atau relevansi langsung dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.	Tidak ada

No	Tema isu pembangunan berkelanjutan	Pasal 9 ayat (1)						
		Karakteristik Wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar Isu PB	Keterkaitan dengan materi muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS hirarki di atas	Hasil KLHS wilayah berdekatan
		RBI						
3	Kemiskinan	Di wilayah Kabupaten Temanggung	Sangat penting. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung 11,24%. Kondisi tersebut muncul karena kualitas sumber daya manusia rendah.	Kemiskinan terjadi karena masih rendahnya peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal masyarakat.	berhubungan dengan misi RPJMD Kabupaten bahwa hendak Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. agar pembangunan dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat maka beberapa program diarahkan pada fungsi pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga nantinya akan mengurangi kesenjangan kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.	Belum ada	Isu PB KLHS RPJMD Kab. Temanggung memiliki keterkaitan atau relevansi langsung dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sebab	Tidak ada

No	Tema isu pembangunan berkelanjutan	Pasal 9 ayat (1)						
		Karakteristik Wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar Isu PB	Keterkaitan dengan materi muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS hirarki di atas	Hasil KLHS wilayah berdekatan
		RBI						
4	Meningkatnya skor indeks kepuasan masyarakat	Di wilayah Kabupaten Temanggung	Sangat penting. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebesar 82 dengan predikat B.	Skor indeks kepuasan masyarakat berkaitan dengan pelayanan dasar yang diberikan pada masyarakat yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sampah yang terolah ke Tempat Pembuangan Akhir masih sangat rendah Rendahnya indeks kualitas lingkungan air, udara, tutupan lahan, dan sampah perkotaan Persentase kepemilikan Kartu Keluarga Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.El) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Laju Pertumbuhan Penduduk	Berhubungan dengan ketiga misi RPJMD Kab. Temanggung yaitu : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, 2. Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah, 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas	Belum ada	Isu PB KLHS RPJMD Kab. Temanggung memiliki keterkaitan atau relevansi langsung dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.	Tidak ada

No	Tema isu pembangunan berkelanjutan	Pasal 9 ayat (1)						
		Karakteristik Wilayah	Tingkat pentingnya potensi dampak	Keterkaitan antar Isu PB	Keterkaitan dengan materi muatan KRP	Muatan RPPLH	Hasil KLHS hirarki di atas	Hasil KLHS wilayah berdekatan
		RBI						
5	Reformasi birokrasi	Di wilayah Kabupaten Temanggung	Sangat penting. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Temanggung mendapat skor Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 72,34 pada tahun 2017.	akuntabilitas dan kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ( <i>clean government</i> ) serta kualitas pelayanan publik masih di Kabupaten Temanggung perlu diperbaiki.	Berhubungan dengan misi kabupaten Temanggung yang ke tiga yaitu Misi hendak mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berorientasi kinerja dan pelayanan publik merupakan dasar penting dari pembangunan daerah. Dengan Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas maka terwujud peningkatan kinerja pembangunan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Belum ada	Isu PB KLHS RPJMD Kab. Temanggung memiliki keterkaitan atau relevansi langsung dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sebab	Tidak ada

#### **4.1.3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Kabupaten Temanggung**

Diperoleh gambaran enam isu paling strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, kemudian sesuai PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 (2), diperlukan identifikasi isu paling strategis menjadi isu prioritas dengan mempertimbangkan unsure-unsur paling sedikit meliputi : (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung; (2) Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup; (3) Kinerja layanan atau jasa ekonsistem; (4) Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam; (5) Status mutu dan ketersediaan sumberdaya alam; (6) Ketahanan dan potensi keaneka-ragaman hayati;

(7) Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (8) Tingkat dan status jumlah penduduk miskin; (9) Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; (10) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu oleh masyarakat adat. Untuk menentukan isu paling strategis menjadi isu prioritas digunakan skala likert agar dapat mengukur sikap, pendapat dan persepsi anggota Pokja PL terhadap kondisi lingkungan yang diamanatkan pasal 9, ayat (2), PP 46 Tahun 2016.

Cara kerja penilaian adalah bersama dengan Pokja PL melakukan penyepakatan penilaian dengan memberikan pilihan jawaban penilaian keterkaitan isu paling strategis terhadap pertimbangan unsur-unsur sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 (2).

Pilihan jawab dilakukan berdasarkan pada skoring dari 1-10, dengan menggunakan skala likert guna mengukur pernyataan seseorang terhadap sesuatu obyek, yang jenjangnya bisa tersusun dari yang nilai tertinggi sebagai isu prioritas dan nilai selanjutnya mengikuti urutan prioritas (Markusic, 2009).

Pertama, dihitung banyaknya responden yang memberi skor tertentu secara keseluruhan (seluruh butir pernyataan isu strategis). Kedua dilihat yang terbanyak (mode) dari responden memilih skor beberapa dari keseluruhan butir, lalu disusun nilai skornya yang tertinggi menjadi isu prioritas pertama dan mengikutinya berada pada skor dibawahnya (kedua, ketiga dan seterusnya).

Sebagai gambaran pernyataan dari tidak berpengaruh (1) hingga sangat berpengaruh (10). Semakin besar nilai bobotnya maka isu paling strategis menjadi isu prioritas. Berdasarkan penilaian tersebut nilai total yang didapat untuk masing-masing isu diatas 50, hal ini dapat diartikan bahwa dari keenam isu prioritas tersebut dianggap penting dan berpengaruh terhadap lingkungan Kabupaten Temanggung secara umum oleh responden. Hasil diperoleh urutan prioritas Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut (lebih jelasnya lihat tabel 4.6. dibawah ini):

1 : Indeks Pembangunan Manusia

2 : Kemiskinan

- 3 : Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja
- 4 : Reformasi birokrasi
- 5 : Meningkatnya skor indeks kepuasan masyarakat

**Tabel 4. 6.**  
**Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas**

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling strategis	Pasal 9 ayat (2)										Juml	Ket.
		Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan	Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam	Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu oleh masyarakat adat		
		1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	8	8	6	9	6	6	8	8	8	0	67	Prioritas 1
2.	Kemiskinan	8	8	6	6	8	8	6	8	8	0	66	Prioritas 2
3.	Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja	6	8	6	6	8	8	8	7	7	0	64	Prioritas 3
4.	Reformasi birokrasi	8	8	6	7	7	6	6	7	7	0	62	Prioritas 4
5.	Meningkatnya skor indeks kepuasan masyarakat	6	6	6	6	7	6	7	8	8	0	60	Prioritas 5

#### 4.1.4. Penjelasan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Di Kabupaten Temanggung

##### 4.1.4.1. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan hidup minimal masyarakat yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Temanggung sebesar 68,34 dengan kategori sedang (peringkat 26 se-Jawa Tengah). Jika dibandingkan dengan angka IPM Jawa Tengah dan nasional maka Kabupaten Temanggung masih berada di bawah. Indeks IPM Kabupaten Temanggung tahun 2017 antara lain adalah Angka Harapan Hidup (AHH) 75,42 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 12,07 tahun dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah ataupun nasional

##### a. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka AHLS dihitung untuk penduduk usia 7 (tujuh) tahun ke atas.

Tabel 4.7  
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
1	2013	11,39
2	2014	11,69
3	2015	11,89
4	2016	12,06
5	2017	12,07

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, AHLS di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat namun tergolong kategori sangat rendah.

##### b. Rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan



rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
1	2013	6,13
2	2014	6,18
3	2015	6,52
4	2016	6,55
5	2017	6,90

Sumber: Dindikpora Kab. Temanggung, 2018

Angka Rata-rata Lama Sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir masuk kategori sangat rendah.

### 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan perbandingan jumlah murid usia tertentu terhadap jumlah penduduk usia tertentu dikali 1.000. APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihitung dari perbandingan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak terhadap seluruh jumlah anak usia 4-6 tahun dikali 100%.

Sedangkan APS SD/MI/Paket A diperoleh dari perbandingan jumlah murid usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 1.000. APS SMP/MTs/Paket B diperoleh dari perbandingan murid usia 13-15 tahun terhadap penduduk usia 13-15 tahun dikali 1.000.

**Tabel 4.7**

Angka Partisipasi Sekolah PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>PAUD</b>					
	APS PAUD	76,15	76,15	76,18	76,38	74,00
	<b>Pendidikan Dasar</b>					
1.	APS SD/MI/Paket A	987,91	994,25	999,31	996,04	996,00
2.	APS 13 - 15 tahun	873,60	993,25	993,34	998,02	998,00

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2018

## 2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu dikali 100 %.

Tabel 4.8  
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2017

No	Jenis Sekolah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A	95,42	95,45	95,49	96,59	96,65
2.	SMP/MTs/Paket B	83,64	83,69	83,74	84,01	84,20

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

APM baik itu di tingkat SD maupun SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## 3) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) menunjukkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen.

Tabel 4.9  
Angka Putus Sekolah (APtS)  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APtS SD/MI	0,16	0,17	0,16	0,07	0,08
2.	APtS SMP/MTs	0,82	0,55	0,51	0,33	0,29

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

## 4) Angka Kelulusan Sekolah (AL)

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada jenjang tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pada tahun 2013-2017 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs  
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI	11.799	11.911	12.058	11.764	11.542
2.	SMP/MTs	9.480	9.389	9.911	10.296	10.536

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

**5) Angka Melanjutkan (AM)**

Angka melanjutkan adalah persentase lulusan sekolah yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Tabel 4.11**  
 Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs  
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI ke SMP/MTS	92,53	97,02	97,20	97,37	97,00
2.	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	64,36	72,97	73,74	82,15	80,52

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

**6) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD dan Pendidikan**

**Dasar**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.12  
 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar  
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>PAUD</b>					
	Jumlah sekolah PAUD	152	152	271	813	280
	Jumlah Siswa PAUD	4.912	7.439	5.472	30.551	6.877

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah sekolah negeri	411	411	411	411	411
1.1.1	Jumlah SD negeri	409	409	409	409	409
1.1.2	Jumlah MI negeri	2	2	2	2	2
1.2.	Jumlah sekolah swasta	163	164	165	166	166
1.2.1	Jumlah SD swasta	23	23	23	23	23
1.2.2	Jumlah MI swasta	140	141	142	143	143
1.3.	Jumlah sekolah SD/MI	574	575	576	577	577
1.4.	Jumlah penduduk usia 7-12 th	71.530	72.848	69.970	69.459	69.670
1.5.	Rasio per 10.000	80,25	78,93	86,61	83,07	82,78
	Rasio ideal per 10.000	52				
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah sekolah negeri	44	44	44	44	44
2.1.1	Jumlah SMP negeri	42	42	42	42	42
2.1.2	Jumlah MTs negeri	2	2	2	2	2
2.2.	Jumlah sekolah swasta	61	61	62	63	64
2.2.1	Jumlah SMP swasta	30	30	31	32	33
2.2.2	Jumlah MTs swasta	31	31	31	31	31
2.3.	Jumlah sekolah SMP/MTs	105	105	106	107	108
2.4.	Jumlah penduduk usia 13-15 th	35.740	36.005	34.381	34.318	34.394
2.5.	Rasio per 10.000	29,38	29,16	30,83	31,18	31,39

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Rasio ideal per 10.000	52				

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

## 7) Rasio guru/murid sekolah PAUD dan Pendidikan Dasar

Tabel 4.13  
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>PAUD</b>					
	Jumlah Guru PAUD	583	909	1.719	2.499	788
	Jumlah Siswa PAUD	4.912	7.439	5.472	3.051	5.969
	Rasio Guru terhadap siswa	1 : 8,43	1 : 8,18	1 : 3,18	1 : 1,2	1:7,57
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah guru	5.728	5.527	5.488	5.550	5.449
1.1.1	Jumlah guru SD PNS	2.806	2.616	2.689	2.568	2.567
1.1.2	Jumlah guru SD Non PNS	1.576	1.634	1.558	1.722	1.721
1.1.3	Jumlah guru MI PNS	164	162	153	156	149
1.1.4	Jumlah guru MI Non PNS	1.182	1.115	1.088	1.104	1.169
1.2.	Jumlah murid sekolah negeri	56.305	55.245	54.599	54.920	54.966
1.2.1	Jumlah murid SD negeri	55.598	54.492	53.773	54.032	54.032
1.2.2	Jumlah murid MI negeri	707	753	826	888	934
1.3.	Jumlah murid sekolah swasta	19.461	20.107	20.978	22.108	45.138
1.3.1	Jumlah murid SD swasta	4.860	5.174	5.233	5.316	25.756
1.3.2	Jumlah murid MI swasta	14.601	14.933	15.745	16.792	19.382

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.4.	Jumlah murid	75.766	75.352	75.577	77.028	100.104
1.5.	Rasio per 10.000	756,01	733,49	726,15	720,52	544,35
	Rasio ideal per 10.000	500				
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah guru	2.136	2.201	2.167	2.159	2.164
2.1.1	Jumlah guru SMP PNS	975	950	933	936	1.075
2.1.2	Jumlah guru SMP Non PNS	557	581	612	610	460
2.1.3	Jumlah guru MTs PNS	94	102	95	84	98
2.1.4	Jumlah guru MTs Non PNS	510	568	527	529	582
2.2.	Jumlah murid sekolah negeri	21.944	20.032	20.498	21.111	21.145
2.2.1	Jumlah murid SMP negeri	20.310	18.431	18.788	19.352	19.352
2.2.2	Jumlah murid MTs negeri	1.634	1.601	1.710	1.759	1.802
2.3.	Jumlah murid sekolah swasta	11.292	10.588	11.521	11.943	12.000
2.3.1	Jumlah murid SMP swasta	5.531	5.067	5.633	5.900	5.695
2.3.2	Jumlah murid MTs swasta	5.761	5.521	5.888	6.043	6.305
2.4.	Jumlah murid	33.236	30.620	32.019	33.054	33.145
2.5.	Rasio per 10.000	642,67	718,81	676,79	653,17	652,98
	Rasio ideal per 10.000	500				

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

### 8) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek

huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf dapat dihitung dari membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian dikalikan dengan seratus.

**Tabel 4.14**  
Angka Melek Huruf  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	95,99	95,99	98,34	98,37	98,70

Sumber : BPS dan Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

### 9) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Pendidik yang memenuhi kualifikasi S<sub>1</sub>/D<sub>IV</sub>, S<sub>2</sub> atau lebih diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas anak didiknya. Selama kurun waktu tahun 2013 - 2017, persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S<sub>1</sub>/D<sub>IV</sub>, S<sub>2</sub> atau lebih di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S1/D-IV, S2 atau lebih  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kualifikasi S<sub>1</sub>/D<sub>IV</sub></b>					
a. Guru SD/MI	3.576	4.508	4.666	4.809	4.809
b. Guru SMP/MTs	1.726	1.823	1.904	1.815	1.815
<b>Kualifikasi S<sub>2</sub> atau lebih</b>					
a. Guru SD/MI	19	19	31	69	69
b. Guru SMP/MTs	53	53	62	49	49

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung, 2017

### c. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya. Keberhasilan program kesehatan dan program

pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. AHH penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.16**  
Angka Harapan Hidup Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,31	75,34	75,35	75,39	75,42

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Temanggung, 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 AHH di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,42 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

**d. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

**Tabel 4.17**  
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	62,34	127,16	27,00	93,17	67,45

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa angka kematian ibu selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, kadang jumlahnya menurun dan bertambah secara drastis, dan Tahun 2014 adalah yang tertinggi yaitu sebesar 127,16 per 100.000 KH.



#### e. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000.

**Tabel 4.18**  
Angka Kematian Bayi Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kematian bayi (jiwa)	173	167	183	136	137
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	11.228	11.010	10.935	10.733	10.378
3.	Angka kematian bayi	15,41	15,17	16,8	12,7	13,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Angka kematian bayi pada tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut pada tabel 2.15 Pada tahun 2017 angka ini mengalami kenaikan dari 12,70 ‰ menjadi 13,20 ‰. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil, bayi.

#### f. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Temanggung mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita. Hasil kegiatan PSG yang ditampilkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terlihat proporsi status gizi buruk berdasarkan BB/U tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,35 persen dari tahun 2016 yang sebesar 0,29 persen. Persentase gizi balita dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.19**  
Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung  
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase balita gizi buruk	0,39	0,39	0,38	0,29	0,35

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.	Persentase balita gizi kurang	13,47	14,00	6,56	5,81	5,29
3.	Persentase balita gizi baik	83,75	82,20	89,9	92,21	92,22
4.	Persentase balita gizi lebih	1,85	1,80	2,79	1,98	1,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacangan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

### 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000.

**Tabel 4.20**  
Angka Kematian Bayi  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kematian bayi (kasus)	173	167	184	136	137
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	11.228	11.010	10.939	10.733	10.378
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	15,41	15,17	16,82	12,67	13,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

## 2) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian balita selama lima tahun masih fluktuatif, dari 16,74 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi 14,26 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Faktor penyebab kematian balita antara lain karena penyakit infeksi dan juga dipengaruhi kematian bayi.

**Tabel 4.21**  
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Balita Per 1.000 KH	16,74	20,98	19,00	14,26	14,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

## 3) Angka Kematian Neonatal per 10000 kelahiran hidup

**Tabel 4.22**  
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka kelahiran kasar (CBR) per 1.000	7,83	7,95	9,36	9,42	n.a
2	Angka kematian kasar (CDR) per 1.000	4,74	4,90	5,30	5,38	n.a
3	Angka kematian bayi (IMR) per 1.000	11,50	15,41	15,00	16,82	12,7

Sumber : BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Kesehatan Kab. Temanggung, 2017

## 4) Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi/derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan/ ditingkatkan.

**Tabel 4.23**  
Rasio Posyandu dan Balita  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah posyandu	1.497	1.505	1.506	1.505	1.506
2.	Jumlah balita	58.221	45.428	53.645	55.019	60.480

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Rasio	1 : 39	1 : 31	1 : 36	1 : 37	1:38
	<b>Rasio Ideal</b>	<b>1 : 50</b>				

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

#### 5) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantuan Poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya tersebut pada tabel berikut.

**Tabel 4.24**  
Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten Temanggung, 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	760.297	768.290	772.289
2	Jumlah Puskesmas	24	24	26
	a. Puskesmas Rawat Inap	4	4	5
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	20	20	21
3	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 31.844	1 : 33.489	1:29.703
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	40	40	40
5	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 19.706	1 : 20.094	1:29.703
6	Jumlah Pos Kesehatan Desa	162	215	212
7	Rasio PKD per satuan penduduk	1 : 4.866	1 : 3.738	1:3.642

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

#### 6) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat

kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 4.25**  
Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2017

NO	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk	760.297	768.290	772.289
2.	Jumlah Rumah Sakit	4	4	4
	Rumah Sakit Pemerintah	1	1	1
	Rumah Sakit Swasta	3	3	3
3.	Rasio Rumah Sakit	1:190.074	1:192.072	1:193.072
	<b>Rasio ideal</b>	<b>1:100.000</b>		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2017 adalah 1 : 193.072 artinya satu rumah sakit melayani 193.072 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Temanggung dengan penduduk sebesar 772.289 jiwa membutuhkan 8 rumah sakit atau membutuhkan 4 rumah sakit baru.

#### 7) Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk selama lima tahun terakhir tersebut dalam tabel berikut.

**Tabel 4.26**  
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk	760.297	768.290	772.289
2	Jumlah dokter umum	91	71	30
3	Rasio dokter umum	1 : 8.662	1 : 10.820	1:25.743
4	Jumlah dokter gigi	29	28	23
5	Rasio dokter gigi	1 : 27.181	1 : 27.438	1:33.577
6	Jumlah dokter spesialis	25	49	19
7	Rasio dokter spesialis	1 : 31.530	1 : 15.679	1:40.646

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 2017

Rasio dokter umum 1 banding 25.743 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 25.743 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter.

#### 8) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSUD).

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2017 mencapai 100%, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya dan bahkan termasuk melayani ibu hamil yang berasal dari luar wilayah kerjanya. Secara rinci terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.27**  
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	2.652	3.619	3.863	3.796	3.151
2	Jumlah penanganan komplikasi kebidanan	2.972	3.619	3.863	3.796	3.151
3	Cakupan komplikasi kebidanan	112,07	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

#### 9) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

**Tabel 4.28**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	9.495	11.031	10.970	10.616	9.440
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	12.628	11.033	11.561	10.616	10.724
3	Cakupan pertolongan persalinan	75,19	99,98	94,9	100	88,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2013 sampai dengan 2017 cenderung fluktuatif, hal ini bukan karena kurangnya penanganan namun karena sebagian dari jumlah ibu sasaran bersalin belum proses melahirkan sampai dengan bulan Desember.

Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

#### 10) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada  $\geq 80\%$  sasaran bayi (0-11 bulan) dalam satu tahun. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1(satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B, 1 (satu) dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 (dua) dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi, 1 (satu) dosis DT, 1 (satu) dosis campak, 2 (dua) dosis TT.

Desa UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Cakupan desa UCI tiap tahun sama dari tahun 2012, sampai tahun 2016 mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi. Rincian data selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.29**  
Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289
2	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	288	288	288	288	288
3	Persentase	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Selama 5 (lima) tahun terakhir capaian yang sama tersebut dikarenakan ada 1 (satu) desa yang masyarakatnya menolak untuk dilakukan imunisasi pada balita mereka, yaitu desa Bonjor Kecamatan Tretep.

#### 11) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sejak 2012 sampai dengan 2016 selalu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah serta masyarakat di lingkungan sekitar.

**Tabel 4.30**  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Balita Gizi Buruk	16	28	25	19	33
2	Balita Gizi buruk mendapatkan perawatan	16	28	25	19	33
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

#### 12) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan



masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

**Tabel 4.31**  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis (orang)	154.771	158.834	51.530	47.146	Data belum tersedia
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	53,01	34,42	76,29	100	Data belum tersedia

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017*

### 13) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2013 - 2017 cenderung fluktuatif. Capaian pada tahun 2017 sebesar 106,67 persen. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Temanggung telah melebihi target SPM sebesar 90 persen, perkembangannya selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.32**  
Cakupan Kunjungan Bayi  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan Bayi	10.960	10.876	10.531	10.480	9.010
2	Jumlah Bayi Lahir Hidup	11.228	11.010	10.939	10.733	10.378
3	Persentase Kunjungan Bayi	97,8	98,8	96,27	97,64	86,82

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017*

### 14) Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan ibu hamil dengan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, yaitu paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada

trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga.

Cakupan ibu hamil dengan K4 di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2013 – 2017 masih fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.33**  
Cakupan Ibu Hamil K4  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Ibu Hamil	12.654	11.765	12.081	11.634	10.724
2	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	11.694	11.094	10.991	10.794	8.810
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92,41	94,30	90,98	92,78	82,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

#### 15) Cakupan pelayanan nifas

Pada saat masa nifas (paska persalinan) masih terjadi kemungkinan kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan paska persalinan minimal 3 (tiga) kali.

Cakupan pelayanan kepada ibu paska persalinan yang sesuai standar pada kurun waktu tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap ibu pasca melahirkan telah merata dan sesuai standar. Data cakupan kunjungan nifas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.34**  
Cakupan Kunjungan Nifas  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan Nifas	10.828	11.031	10.677	10.378	9.412
2	Jumlah Ibu Nifas	10.842	11.031	11.561	10.616	10.724
3	Cakupan Kunjungan Nifas	96,25	100	92,35	97,76	87,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

#### 4.1.4.2. Kemiskinan

##### a. Rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.35  
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2015 (BASIS DATA TERPADU)	RTLH YANG DITANGANI TAHUN 2015-2017	JUMLAH RTLH 2017
1	PARAKAN	1.492	238	1.254
2	KLEDUNG	1.376	398	978
3	BANSARI	1.452	576	876
4	BULU	2.483	827	1.656
5	TEMANGGUNG	804	214	590
6	TLOGOMULYO	1.086	368	718
7	TEMBARAK	1.401	245	1.156
8	SELOPAMPANG	933	521	412
9	KRANGGAN	1.171	363	808
10	PRINGSURAT	1.723	612	1.111
11	KALORAN	2.979	192	2.787
12	KANDANGAN	2.821	198	2.623
13	KEDU	1.115	464	651
14	NGADIREJO	4.104	791	3.313
15	JUMO	1.816	398	1.418
16	GEMAWANG	2.411	380	2.031
17	CANDIROTO	2.177	420	1.757
18	BEJEN	1.420	142	1.278
19	TRETEP	2.149	195	1.954
20	WONOBOYO	1.940	549	1.391
<b>JUMLAH</b>		<b>36.853</b>	<b>8.091</b>	<b>28.762</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2017

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (varabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 36.853 unit menjadi 28.762 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 8.091 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

**b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 menurun menjadi 19,97%. Pada tahun 2016 jumlah tersebut mengalami kenaikan secara drastis sebanyak 22,17% menjadi 42,14%. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara jelas tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 4.36**  
PMKS yang memperoleh bantuan sosial  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	9.834	9.204	8.963	20.210	20.468
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	45.898	45.003	44.877	47.955	48.470
3	Persentase PMKS yang menerima bantuan	21,43	20,45	19,97	42,14	42,22

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2017*

**c. Persentase rumah tinggal bersanitasi dan air minum layak**

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.37**  
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2014-2017

NO	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tinggal	224.980	246.088	247.568	249.049
2	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak	149.590	172.041	194.493	199.408
	Persentase	66,49	69,91	78,56	80,06

*Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah tinggal bersanitasi layak selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat, dari 66,49% menjadi 80,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung selalu meningkat. Akses sanitasi layak ini, tidak dapat dipisahkan dari akses air minum yang layak.

Akses air minum dilihat dari tersedianya air minum sampai sambungan rumah bagi sistem perpipaan dan ketersediaan air dari sumur gali bagi sistem non perpipaan. Ketersediaan air ini dilihat dari kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya. Persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.38**  
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2013-2017

No.	Uraian	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tinggal	224.980	246.088	247.568	249.049
2	Jumlah rumah tinggal berakses air minum yang layak	161.662	183.740	205.818	205.907
	Persentase (%)	71,85	74,66	83,13	82,67

*Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rumah tinggal dengan akses air minum layak selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat dari 71,85 % menjadi 82,67 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari ketersediaan air minum layak, Kabupaten Temanggung telah memenuhi standar pelayanan minimal air minum.

**d. Persentase areal kawasan kumuh**

Luasan kawasan kumuh pada tahun 2017 ada 297,81 Ha meliputi kawasan perkotaan Temanggung dan Parakan.

**4.1.4.3. Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kompetensi tenaga kerja**

**a. Jalan Kondisi Baik**

Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta adanya dukungan program dari provinsi maupun pusat. Total panjang jalan kabupaten adalah 739,127 km dan terdapat 335 unit jembatan.

Jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.39  
Jalan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Baik (km)	%
2013	739,127	502,606	68,00
2014	739,127	504,313	68,23
2015	739,127	552,818	74,79
2016	739,127	566,488	76,64
2017	739,127	607,25	82,16

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2017

Dari tabel di atas, jalan kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi jalan pada Tahun 2017, dari total 739,127 km panjang jalan yang ada terdapat 607,25 km jalan berkondisi baik atau setara dengan 82,16 %.

**b. Jembatan kondisi baik**

Jembatan kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi jembatan pada Tahun 2017, dari total 335 unit jembatan yang ada terdapat 302 unit jembatan berkondisi baik atau setara dengan 90,15%.

Tabel 4.40  
Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	%
2013	335	276	82,39
2014	335	282	84,18
2015	335	283	84,48
2016	335	285	85,07
2017	335	302	90,15

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2017

#### d. Jaringan irigasi kondisi baik

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jumlah DI kabupaten berkondisi baik ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.41  
Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Jumlah DI (unit)	Kondisi Baik (unit)	%
2013	577	392	67,94
2014	577	405	70,19
2015	577	433	75,04

Tahun	Daerah Irigasi (DI) kabupaten		
	Jumlah DI (unit)	Kondisi Baik (unit)	%
2016	577	433	75,04
2017	577	484	83,88

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, 2017

Dari tabel di atas, DI kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi DI pada Tahun 2017, dari total 577 DI yang ada terdapat 484 DI berkondisi baik atau setara dengan 83,88%. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung mampu mengairi lahan seluas 17.711 hektar.

**e. Skor Pola Pangan Harapan**

Skor Pola Pangan Harapan didapat dari energi masing-masing komoditas dibagi angka kecukupan gizi dikali 100%.

**Tabel 4.42**

Skor Pola Pangan Harapan  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2017

Tahun	2014	2015	2016	2017
Skor Pola Pangan Harapan	89,2	82,5	85,50	87,5

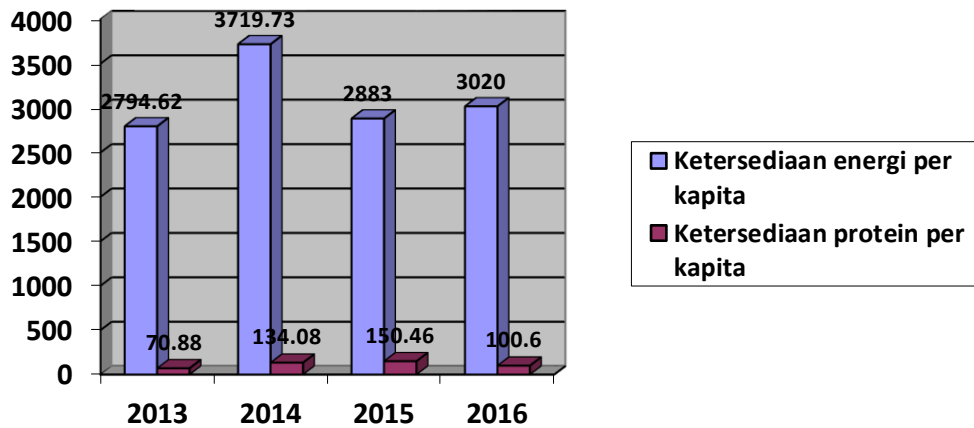
**f. Ketersediaan energi dan protein perkapita**

Ketersediaan energi perkapita yaitu ketersediaan energi dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan kalori kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100. Ketersediaan protein perkapita yaitu ketersediaan protein dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan protein kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100.



Gambar 4.1

Ketersediaan Energi dan Protein per kapita  
Di Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2016



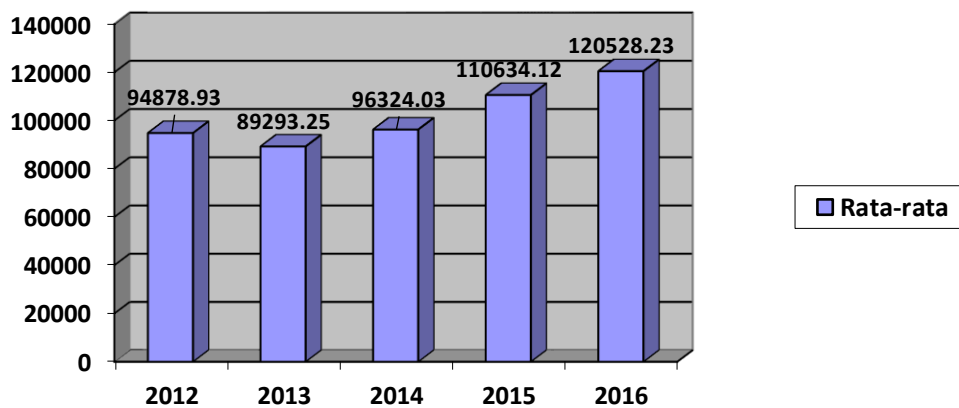
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

**g. Ketersediaan pangan utama**

Rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung meningkat, secara jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Gambar 4.2

Ketersediaan Pangan Utama  
Di Kabupaten Temanggung, tahun 2012-2016



Sumber : DintanKP Kabupaten Temanggung Tahun 2017

**h. Produktivitas Ternak**

Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Disamping itu, hasil sampingannya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging dari ternak potong untuk setiap ekor ternak atau unitnya agaknya ditentukan oleh kadar komposisi daging dari daging-daging ternaknya. Ternak potong yang baik haruslah mempunyai

komposisi daging atau persentase komposisi daging yang tinggi. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh "berat hidupnya". Secara umum, bila semakin tinggi berat hidupnya, maka akan makin besar pula tingkat produksinya.

Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.43  
Produktivitas Ternak Tahun 2014-2017

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)			
		2014	2015	2016	2017
1.	Sapi	165	167	169	173
2.	Kambing	13,13	13,50	13,50	13,53
3.	Domba	13,13	13,50	13,50	13,53

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Temanggung, 2017

Produktivitas ternak di Kabupaten Temanggung tahun 2014-2017 terus meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada ternak sapi yang mencapai 173 kg/ekor pada Tahun 2017, sedangkan pada ternak kambing dan domba produktivitasnya relatif sama yakni sebesar 13,53 kg/ekor.

#### i. Desa terhubung internet

Jaringan internet desa merupakan fasilitas untuk mempermudah layanan informasi dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Dengan adanya jaringan ini akan mempermudah dan memperlancar layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Infrastruktur jaringan sebagian didanai dana desa, sedangkan akses *bandwidth* nya didukung oleh pembiayaan dari APBD Kabupaten Temanggung. Desa terhubung internet di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.44  
Desa Terhubung Internet Tahun 2015-2017

Tahun	Desa terhubung internet			%
	jumlah desa	desa terhubung internet	total desa terhubung internet sampai tahun n	
2015	266	14	14	5,26
2016	266	34	48	18,05
2017	266	68	116	43,61

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung, 2017

## j. Laju investasi

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsipun bertambah dan bertambah pula effective demand. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut induced investment. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Laju investasi menunjukkan perkembangan investasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 sampai 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.45**  
Laju Investasi 2014-2017

Tahun	Nilai Investasi (Rp. milyar.)	Laju Investasi (%)
2014	85,001	25,00
2015	124,679	47,00
2016	147,182	18,05
2017	164,650	11,87

Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2017

Berdasarkan tabel.2.95, laju investasi di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2014 sampai 2017 cukup fluktuatif. Laju paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 47 %, kemudian melambat menjadi 18,05 % dan 11,87 % pada dua tahun terakhir.

**k. Produksi perikanan**

Perkembangan sektor perikanan dapat dilihat dari perkembangan empat hal, yaitu kolam air tenang, sawah/mina padi, perairan umum, dan unit pembenihan rakyat yang dapat dilihat di Tabel berikut.

Tabel 4.46  
Perkembangan Sektor Perikanan  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2016

No.	JENIS DATA	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1.	Kolam air tenang				
	- Luas areal (ha)	119,29	120,25	120,29	121,85
	- Produksi ikan nila (ton)	414,71	519,59	619,06	837,35
	- Produksi ikan lele (ton)	1.513,49	1.946,59	2.182,97	2.826,45
	- Produksi ikan gurami (ton)	3,93	3,94	3,25	54,14
2.	- Produksi ikan mas (ton)	342,26	364,15	n.a	n.a
	- Produksi ikan patin (ton)	4,16	n.a.	n.a	n.a
	- Produksi ikan lainnya (ton)	23,59	25,65	29,33	32,99
	- Nilai produksi (juta)	54.037,84	45.691,21	63.957,99	66.212.688
3.	Sawah/mina padi				
	- Luas areal (ha)	3.127,80	3.190,39	1.351,2	3.251.2
	- Produksi ikan mas (ton)	1.152,26	1.323,42	1.182,99	1.777,698
	- Produksi ikan nila (ton)	270,96	445,09	788,65	1.185,124
	- Nilai produksi (juta)	28.532,80	42.451,77	46.925.050	51.509.016

No.	JENIS DATA	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
4.	Perairan Umum				
	- Luas areal (ha)	21.456	21.506	21.506	21.506
	- Produksi (ton)	181,92	239,01	299.534	427.278
	- Nilai produksi (juta)	3.755,70	5.482,15	10.255.866	14.313.089
5.	Unit Pembenihan Rakyat				
	- Jumlah (unit)	275	275	267	267
	- Produksi usaha (juta ekor)	68,90	78.038,998	84.019.819	89.853.319
	- Nilai produksi (juta)	12.890,50	16.830.69	12.602.972.850	23.092.302.983
	Produksi ikan hias (ekor)	702.000	n.a.	n.a	n.a

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

## I. Produktifitas Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan Kabupaten Temanggung terdiri dari 7 (tujuh) jenis tanaman yaitu tanaman padi sawah, tanaman padi ladang, tanaman jagung, tanaman kacang kedelai, tanaman kacang tanah, tanaman ubi kayu, dan tanaman perkebunan ubi jalar.

**Tabel 4.47**  
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	<b>Tanaman Padi Sawah</b>					
	- Luas tanam (ha)	26.618	25.375	21.689	30.667,2	31.779,0
	- Luas panen (ha)	25.678	26.175	25.403	30.667,0	31.553,0
	- Produktivitas (Kw/ha)	60	60,43	64,31	69,41	60,59
2.	<b>Tanaman Padi Ladang</b>					
	- Luas tanam (ha)	1.465	25	0	0	14970
	- Luas panen (ha)	852	891	0	0	2177
	- Produktivitas (Kw/ha)	37,15	38,80	0	0	55
3.	<b>Tanaman Jagung</b>					
	- Luas tanam (ha)	23.839	21.450	15.355	17.390,8	24.291,6
	- Luas panen (ha)	22.331	22.865	19.190	20.803,4	20.825,3
	- Produktivitas (Kw/ha)	49,82	45,72	42,81	49,70	44,54
4.	<b>Tanaman Kacang Kedelai</b>					
	- Luas tanam (ha)	4	n.a.	8	2,8	0
	- Luas panen (ha)	2	1	8	7,8	0
	- Produktivitas (Kw/ha)	21	22,92	22,67	20,51	0
5.	<b>Tanaman Kacang Tanah</b>					
	- Luas tanam (ha)	388	269	294	347	73
	- Luas panen (ha)	440	210	341	300,8	83
	- Produktivitas (Kw/ha)	15,35	13,38	15,23	17,02	6
6.	<b>Tanaman Ubi Kayu</b>					
	- Luas tanam (ha)	1.712	2.288	921	765,6	185
	- Luas panen (ha)	2.461	1.739	1.970	1.352,6	484

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Produktivitas (Kw/ha)	257,35	302,69	242,58	321,6	346
7.	<b>Tanaman Ubi Jalar</b>					
	- Luas tanam (ha)	251	199	197	283,1	50,8
	- Luas panen (ha)	280	251	219	129,5	10,7
	- Produktivitas (Kw/ha)	143,9	172,26	200,85	248,58	220

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung,  
2017

**m. Produktifitas tanaman perkebunan**

Perkembangan sektor perkebunan dapat dilihat dari beberapa komoditas diantaranya : tanaman teh, tanaman kopi robusta, tanaman kopi robusta, dan tanaman tembakau.



**Tabel 4.48**

Produktifitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tanaman Teh	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
	- Luas tanam menghasilkan	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	- Luas tanaman (ha)	0,72	0,79	1,01	0,97	1,02
	- Jumlah produksi (ton)	1,38	1,51	1,92	1,85	1,94
	- <b>Produktivitas (ton/ha)</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>
2.	Tanaman Kopi Robusta					
	- Luas tanam menghasilkan (ha)	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.218,25
	- Luas tanaman (ha)	9.304,47	9.304,47	9.561,55	9.304,47	9.337,41
	- Jumlah produksi (ton)	7.388,79	10.254,33	7.536,49	10.254,33	3912,48
	- <b>Produktivitas (ton/ha)</b>	<b>0,90</b>	<b>1,25</b>	<b>0,924</b>	<b>1,26</b>	<b>0,48</b>
3.	Tanaman Kopi Arabika					
	- Luas tanam menghasilkan (ha)	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.378,57	1.381,82
	- Luas Tanaman (ha)	1.463,93	1.743,93	1.840,30	1.463,93	2.133,64
	- Jumlah Produksi (ton)	1.027,11	1.405,96	1.109,42	1.305,96	731,81
	- Produktivitas (ton/ha)	0,74	0,94	0,805	0,95	0,52
4.	Tanaman Tembakau					
	- Luas panen (ha)	14.517,00	12.587,00	18.248	16.821	16.058
	- Luas tanam (ha)	14.948,00	15.730,00	19.209	17.021	16.093
	- Jumlah produksi (ton)	7.146,12	6,922,92	10.581,3	6.041,25	99.048,73
	- <b>Produktivitas (ton/ha)</b>	<b>0,49</b>	<b>0,55</b>	<b>0,58</b>	<b>0,53</b>	<b>0,62</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, 2017

#### n. Populasi dan Produksi Ternak

Jumlah populasi dan produksi hasil peternakan terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.49**  
Populasi dan Produktifitas Ternak  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sapi					
	- Jumlah Populasi (ekor)	27.282	29.115	32.665	32.830	37.303
	- Jumlah Produksi (ton)	365,06	3878	519,624	622.934	615.498
	- Jumlah pemotongan (ton)	2.296	n.a	3.093	3.686	3.642
	- Rata-rata kepemilikan (ekor/org)	2	0,82	2	2	2
2.	Populasi Domba (gembel)	287.584	286.058	350.770	350.770	352.524
3.	Populasi Kambing (ekor)	61.098	70.046	75.685	75.685	76.063
4.	Ayam Pedaging					
	- Jumlah Populasi (ekor)	600.000	786.136	933.967	4.759.500	4.783.298
	- Jumlah Produksi (ton)	5.199	7.861	1.238	3.962	7.088
	- Jumlah peternak (ton)	130	150	125	125	125
	- Rata-rata kepemilikan (ekor/org)	4.615	5.000	7.000	7.000	6.000
5.	Ayam Petelur					

No.	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	- Jumlah Populasi (ekor)	686.825	681.503	682.641	684.235	687.656
	- Jumlah Produksi (ton)	4.464	4.480,31	4.445	7.328	8.614
	- Jumlah pemotongan (ton)	68	70	50	50	n.a
	- Rata-rata kepemilikan (ekor/org)	10.000	10.000	13.500	13.500	13.700
6.	Populasi Burung Puyuh	51.255	51.357	18.745	51.605	51.798

*Sumber : Dinakan Kab. Temanggung, 2017*

#### **o. Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan**

Jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, antara lain Pikatan water park dan Posong. Tempat wisata yang baru berkembang dan mampu menarik wisatawan berkunjung adalah tempat wisata berbasis alam, antara lain Jumprit, Sedengkeng, Sedhadap, Watu Layah, Watu Angkrik, beraneka Curug, dan beraneka Embung. Salah satu cagar budaya yang menarik wisatawan adalah Situs Liyangan.

Perkembangan jumlah dan lama kunjungan wisatawan tahun 2014-2017 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

**Tabel 4.50**  
Perkembangan Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan  
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah wisatawan manca negara (jiwa)	155	435	364	107
2.	Jumlah wisatawan domestik (jiwa)	338.781	395.717	428.381	491.037
3.	Lama kunjungan wisatawan (hari)	0,16	0,25	0,25	0,42

*Sumber : Dinbudpar Kab.Temanggung, 2017*

#### **4.1.4.4. Kajian jasa ekosistem menurut ekoregion dan tutupan lahan**

##### **a. Jasa ekosistem penyediaan pangan**

Batasan yang dimaksud oleh Jasa Ekosistem Pangan merupakan kemampuan wilayah untuk menyiapkan atau memberikan produksi atau hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Temanggung secara umum yang tidak berbatasan dengan lautan, maka jasa ekosistem ini terbatas pada penyediaan makanan pokok hasil bumi bukan hasil laut.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Temanggung Dalam Angka Tahun 2017 menunjukkan bahwa Kecamatan Kedu merupakan kecamatan dengan pertanian lahan sawah irigasi terluas yakni 2.178 Ha dengan area produksi tanaman padi sebanyak 3.192 Ha, disusul dengan Kecamatan

Temanggung dengan luas sawah irigasi 1.890 Ha dengan lahan produksi padi seluas 2.425 Ha. Sementara untuk pertanian lahan kering seperti ladang, tegal dan perkebunan menurut Temanggung Dalam Angka Tahun 2017 banyak dijumpai pada Kecamatan Kaloran (2.526 Ha) dan juga Kecamatan Tretep (2.304 Ha). Kecamatan Kandangan juga mendominasi kepemilikan ladang atau huma dengan luas 2.629 Ha.

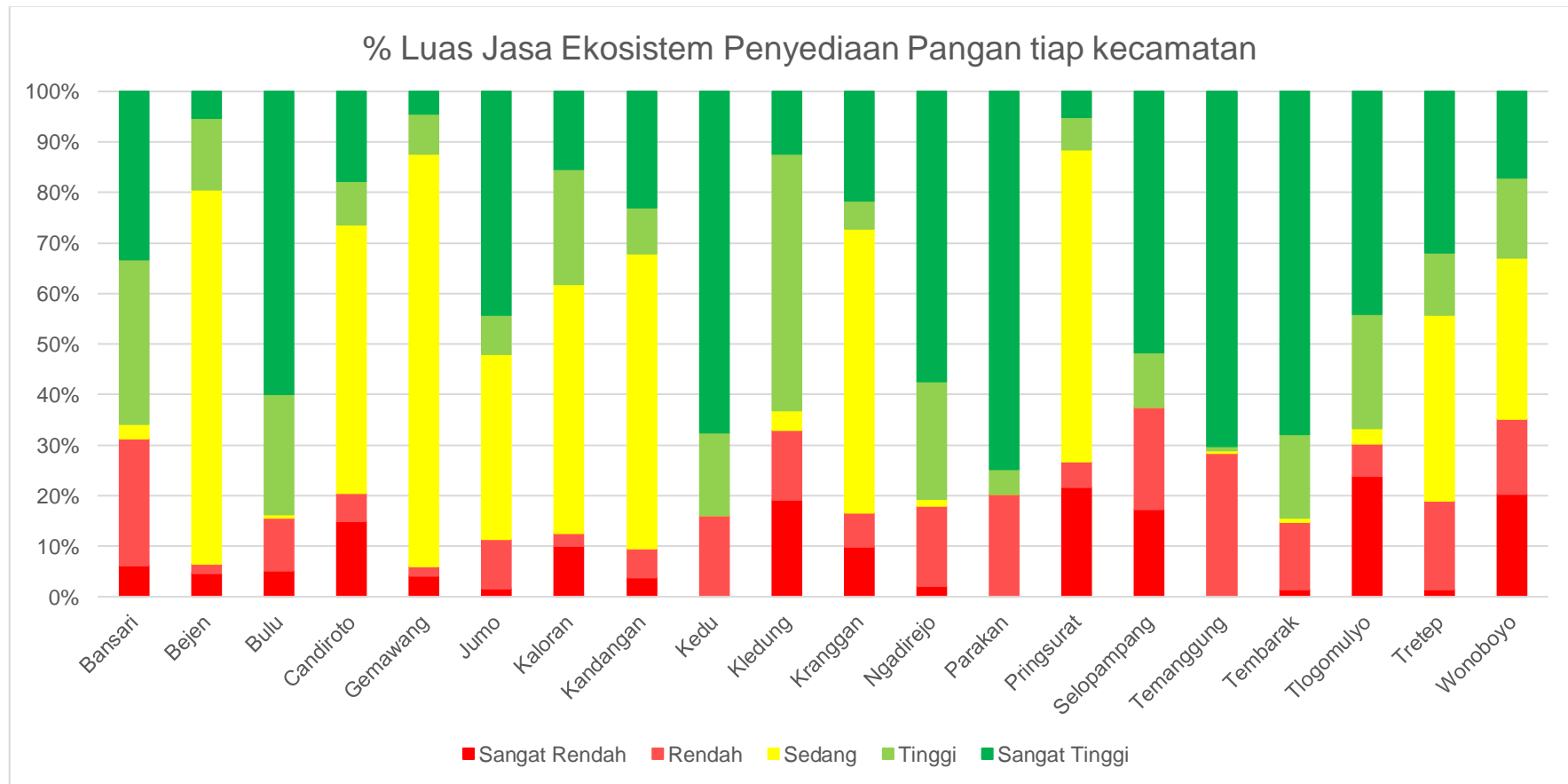
Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Menurut hasil kajian jasa ekosistem pangan, wilayah dengan luasan tertinggi untuk nilai penyediaan pangan berada pada Kecamatan Kedu dengan luas total 2.517 Ha. Sementara luasan terluas dengan nilai jasa ekosistem penyedia pangan terendah berada pada Kecamatan Pringsurat dengan luas 1.282 Ha. Meskipun hasil kajian Daya Dukung dan Daya Tampung tidak persis sesuai dengan data yang ditunjukkan oleh Temanggung Dalam Angka Tahun 2017, namun kajian ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Temanggung memiliki lahan pertanian penghasil pangan yang merata di berbagai wilayah kecamatannya.

Hasil pertanian pangan di Kabupaten Temanggung juga cukup besar, menurut Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2017 menunjukkan bahwa produksi padi mencapai 212.900 ton, jagung mencapai 103.393 ton, serta ubi kayu mencapai 43.513 ton sepanjang tahun 2016. Hasil penghitungan luasan per kecamatan untuk jasa ekosistem penyediaan pangan ditampilkan pada **Tabel** berikut.

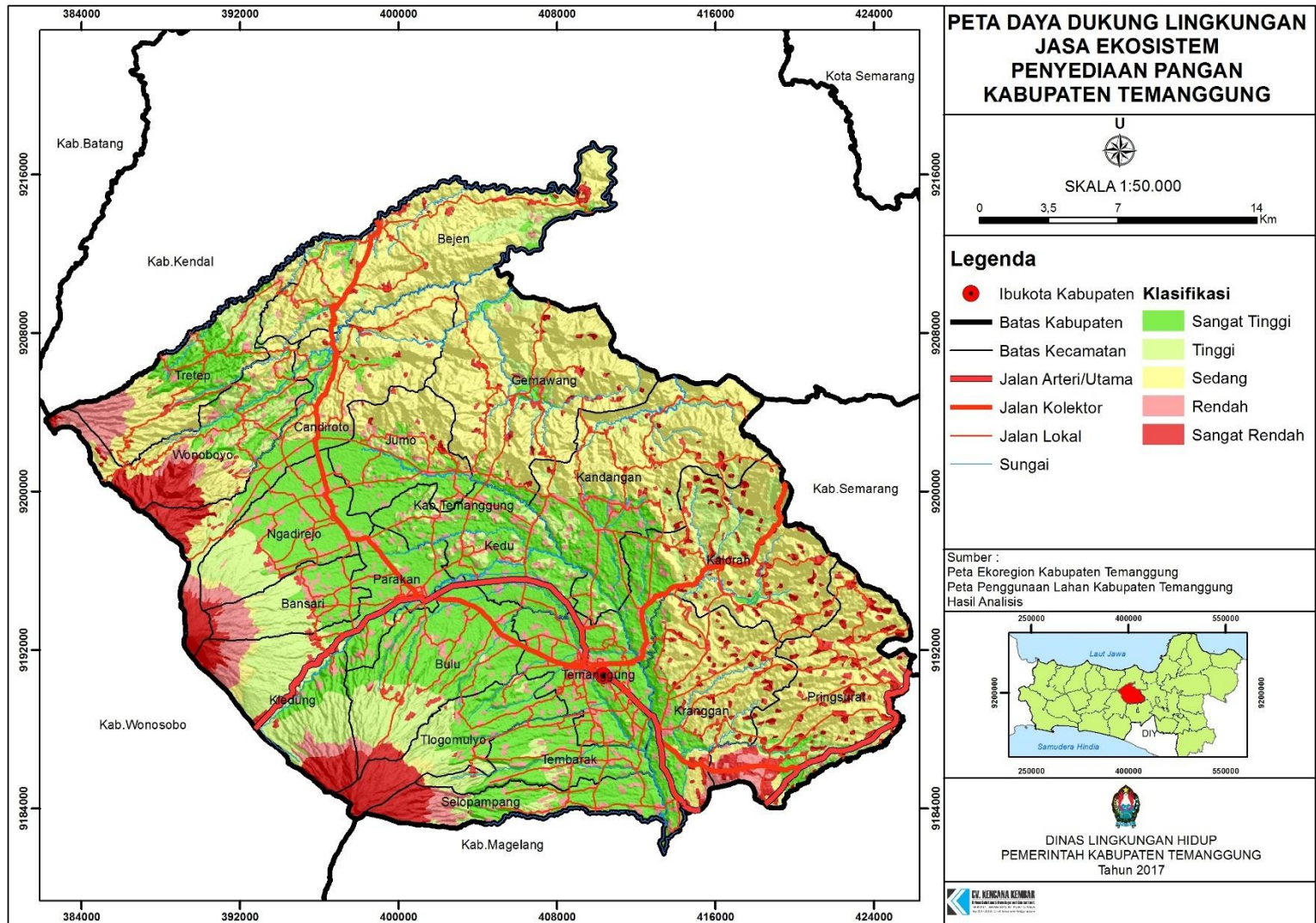
Tabel 4.51 Luas Jasa Ekosistem Pangan Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari	125.71	518.70	61.12	670.14	684.27	2,059.94	6.10	25.18	2.97	32.53	33.22
Bejen	304.82	126.47	4,889.60	935.74	344.67	6,601.31	4.62	1.92	74.07	14.18	5.22
Bulu	243.69	484.95	34.82	1,111.73	2,811.83	4,687.03	5.20	10.35	0.74	23.72	59.99
Candiroto	858.94	327.32	3,060.70	494.28	1,022.58	5,763.82	14.90	5.68	53.10	8.58	17.74
Gemawang	315.85	131.52	6,156.91	598.39	333.73	7,536.41	4.19	1.75	81.70	7.94	4.43
Jumo	51.81	303.49	1,147.82	238.70	1,384.32	3,126.15	1.66	9.71	36.72	7.64	44.28
Kaloran	660.73	161.01	3,225.00	1,496.06	1,004.83	6,547.62	10.09	2.46	49.25	22.85	15.35
Kandangan	270.67	413.76	4,194.88	656.45	1,649.99	7,185.75	3.77	5.76	58.38	9.14	22.96
Kedu	-	598.10	4.46	606.16	2,517.94	3,726.66	0.00	16.05	0.12	16.27	67.57
Kledung	788.46	570.09	164.39	2,093.14	508.50	4,124.58	19.12	13.82	3.99	50.75	12.33
Kranggan	514.06	352.86	2,919.48	291.44	1,127.83	5,205.68	9.88	6.78	56.08	5.60	21.67
Ngadirejo	77.45	565.57	50.28	832.85	2,048.43	3,574.58	2.17	15.82	1.41	23.30	57.31
Parakan	-	416.88	0.41	97.26	1,528.37	2,042.92	0.00	20.41	0.02	4.76	74.81
Pringsurat	1,282.67	302.30	3,657.52	377.64	300.70	5,920.84	21.66	5.11	61.77	6.38	5.08
Selopampang	420.93	488.36	0.12	263.46	1,251.49	2,424.35	17.36	20.14	0.00	10.87	51.62
Temanggung	-	946.01	14.82	30.42	2,333.60	3,324.84	0.00	28.45	0.45	0.91	70.19
Tembarak	31.02	301.11	18.94	372.05	1,524.98	2,248.10	1.38	13.39	0.84	16.55	67.83
Tlogomulyo	668.73	179.70	81.02	633.62	1,231.74	2,794.82	23.93	6.43	2.90	22.67	44.07
Tretep	52.11	657.33	1,364.64	460.02	1,189.11	3,723.22	1.40	17.65	36.65	12.36	31.94
Wonobojo	866.01	636.67	1,357.35	679.73	725.25	4,265.00	20.31	14.93	31.83	15.94	17.00
<b>Total</b>	<b>7,533.65</b>	<b>8,482.20</b>	<b>32,404.28</b>	<b>12,939.29</b>	<b>25,524.16</b>	<b>86,883.59</b>	<b>8.67</b>	<b>9.76</b>	<b>37.30</b>	<b>14.89</b>	<b>29.38</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2017



**Gambar 4.3. Luas Jasa Ekosistem Pangan Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung**



**Gambar 4.4. Jasa Ekosistem Pangan Kabupaten Temanggung**



Terlihat dari **Tabel 4.51**, **Gambar 4.4** dan juga grafik bahwa Kabupaten Temanggung merupakan penghasil atau penyedia pangan dengan mayoritas tingkat luasan sedang dan sangat tinggi. Lokasi sumber produksi pangan pun merata di 20 kecamatan di Temanggung, bahkan pada Kecamatan Kedu dan Kecamatan Temanggung luasan dengan kadar indeks penyedia pangan sangat tinggi mencapai 67,57% dan juga 70,19% dari luasan wilayah kecamatan ini.

Dataran aluvial dan kaki gunungapi memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara. Material ekoregion ini berasal dari material erupsi gunungapi yang mengandung berbagai mineral. Lapisan tanahnya relatif tebal sehingga baik untuk menjadi media tanam. Kemampuan tanah dalam mengalirkan air di ekoregion ini, relatif baik. Tekstur tanah berupa pasir yang mempunyai jarak antar pori yang besar. Ruang antar pori menjadi lokasi untuk cadangan air tanah sehingga ketersediaannya tetap terjaga. Tanah alluvium memiliki kemampuan yang baik untuk menyerap dan mengalirkan air. Kesuburan tanah dan kemudahan sumber air merupakan syarat utama untuk kegiatan pertanian. Kabupaten Temanggung merupakan penghasil tanaman pangan khususnya tanaman padi dan jagung. Sepanjang tahun 2016, produksi kedua tanaman bahan makanan pokok ini mencapai 212.900 ton untuk padi dan 103.393 ton untuk tanaman jagung (Temanggung Dalam Angka 2017). Hal ini menunjukkan bahwa lahan tanaman sawah dan juga ladang kebun di Kabupaten Temanggung sangat potensial, sehingga kedepannya hasil perhitungan indeks ini dapat menjadi bahan penyedia database untuk ditetapkannya lahan-lahan sawah abadi. Kondisi topografi dan juga profil ekoregion Temanggung mendukung wilayah ini untuk dapat menghasilkan tanaman selain bahan pangan utama yang diantaranya adalah sayur, dan juga hasil perkebunan seperti buah dan juga tembakau yang mencapai luasan 16.821 Ha dengan produksi tahun 2016 sebesar 6.041 ton. Sayuran seperti Tomat, bawang, kentang, kubis dan cabai merupakan hasil sayuran yang dihasilkan di wilayah Temanggung secara umum. Selain itu, Temanggung juga kaya berbagai jenis kopi, seperti jenis arabika dan robusta dengan luas total lahan budidaya kopinya mencapai 9.500 Ha yang menghasilkan produksi kopi per tahun 2016 sebanyak 5.400 ton.

Dataran aluvial dan kaki gunungapi berbeda karakteristik dengan bentuk pegunungan dan perbukitan struktural. Lapisan tanah yang cenderung tipis serta kurangnya unsur hara membuat tidak sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian. Sumberdaya tanah pada bentanglahan ini tidak cocok untuk media tanam dan tidak cocok pula untuk produksi pangan, hasil yang didapatkan menjadi tidak maksimal. Ekoregion ini diarahkan untuk kawasan lindung dengan komoditas tanaman tahunan, bukan untuk budidaya tanaman semusim agar bahaya erosi dan tanah longsor dapat diminimalisir.

## b. Jasa ekosistem penyediaan air bersih

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion bentanglahan. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa

Jasa Ekosistem penyediaan air bersih tidak hanya ditentukan dari keberadaan air tanah saja, namun juga kualitas air permukaan kaitannya dengan kebutuhan air dengan penggunaan domestik dan juga industri. Pada **Tabel 4.52, Gambar 4.6**, dan juga grafik dijabarkan indeks jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Temanggung. Kondisi Temanggung yang juga memiliki pegunungan dan perbukitan struktural pun mempengaruhi ketersediaan air. Ketersediaan air di pegunungan dan perbukitan relatif lebih sedikit. *Impermeable layer* di pegunungan dan perbukitan membuat air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Kondisi tersebut menyebabkan air tanah langka di ekoregion ini, apabila ada hanya berupa rembesan dari lereng.

Ekoregion berpotensi sedang dan rendah untuk penyediaan air adalah pegunungan/perbukitan struktural patahan atau lipatan. Perbedaan karakteristik tanah dan batuan induk antar ekoregion menyebabkan variasi kemampuan dalam menyerap dan mengalirkan air. Hal tersebut akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dan permukaan suatu wilayah. Karakteristik tanah di dataran aluvial dan kaki gunung api didominasi oleh pasir. Rongga antar pori-pori tanah di tanah bertekstur pasir relatif besar sehingga dapat menampung air tanah. Jarak pori antar tanah yang besar juga memudahkan air hujan masuk dan mengalir. Ekoregion ini memiliki banyak akuifer karena tingginya kemampuan dalam meluluskan dan meneruskan air. Menurut Temanggung Dalam Angka Tahun 2017, Kecamatan Kedu merupakan kecamatan dengan pertanian lahan sawah irigasi terluas yakni 2.178 Ha, disusul dengan Kecamatan Temanggung dengan luas sawah irigasi 1.890 Ha yang menunjukkan bahwasanya kedua wilayah ini memiliki *demand* pengairan yang sangat banyak. Kondisi kecamatan lain di Temanggung yang dapat menyediakan kebutuhan air bersih menurut hasil kajian daya dukung daya tampung dari jasa ekosistem penyediaan air bersih diharapkan dapat mendukung keadaan masing-masing wilayah ini satu sama lain.

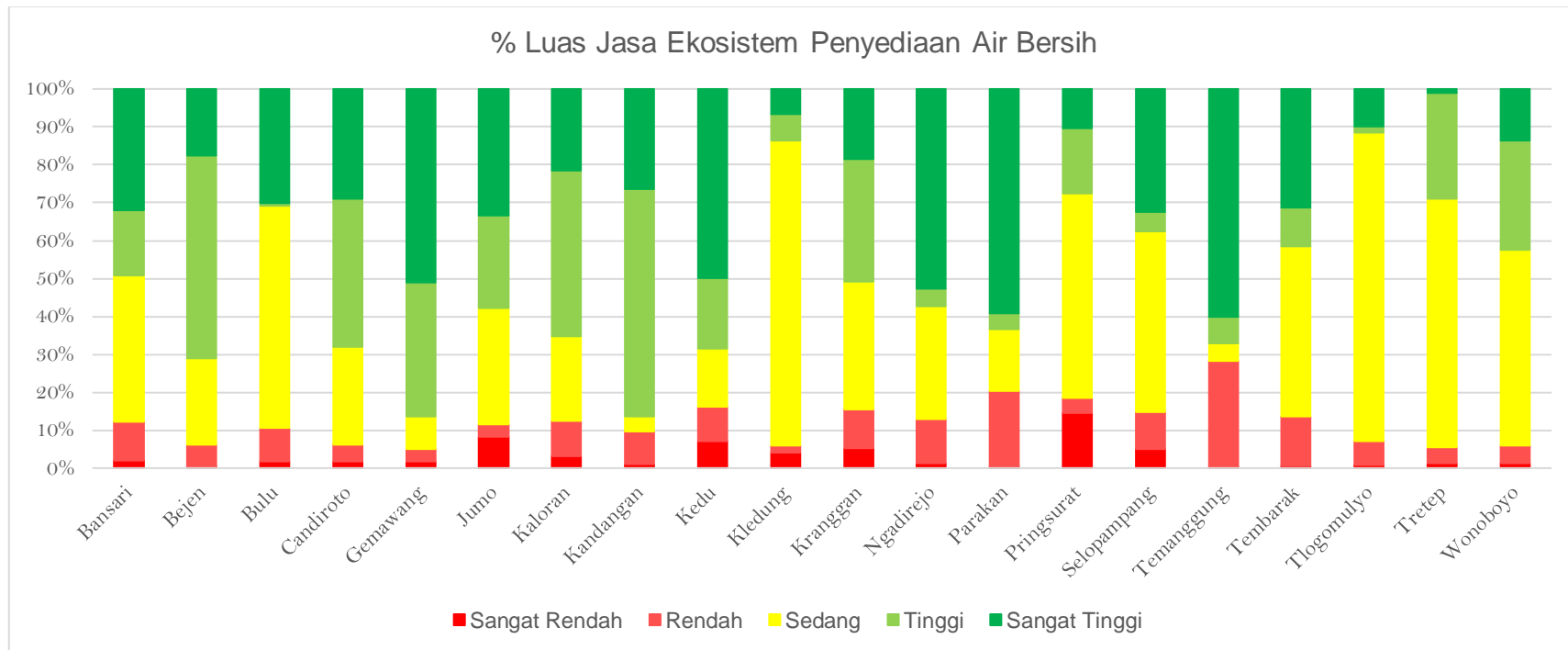
Kondisi yang terlihat pada struktur topografi dan geomorfologi, menunjukkan bahwa mata air sering ditemukan di ekoregion dataran kaki gunungapi, terutama di tekukan lereng. Ekoregion

lembah mempunyai potensi tinggi untuk ketersediaan air karena lokasinya lebih rendah. **Tabel 4.52, Gambar 4.6** dan Grafik dibawah menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Temanggung memiliki potensi penyediaan air bersih yang sangat tinggi. Kecamatan Kandungan misalnya, sekitar 60,02% atau seluas 4.313 Ha wilayahnya memiliki nilai jasa ekosistem penyedia Air Bersih yang skalanya tinggi. Begitu juga dengan beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Gemawang yang memiliki 3.845,3 Ha luas potensi penyedia air bersih menurut jasa ekosistem. Ekoregion dataran aluvial, dataran kaki gunungapi dan lembah antar pegunungan/perbukitan memiliki potensi tinggi.

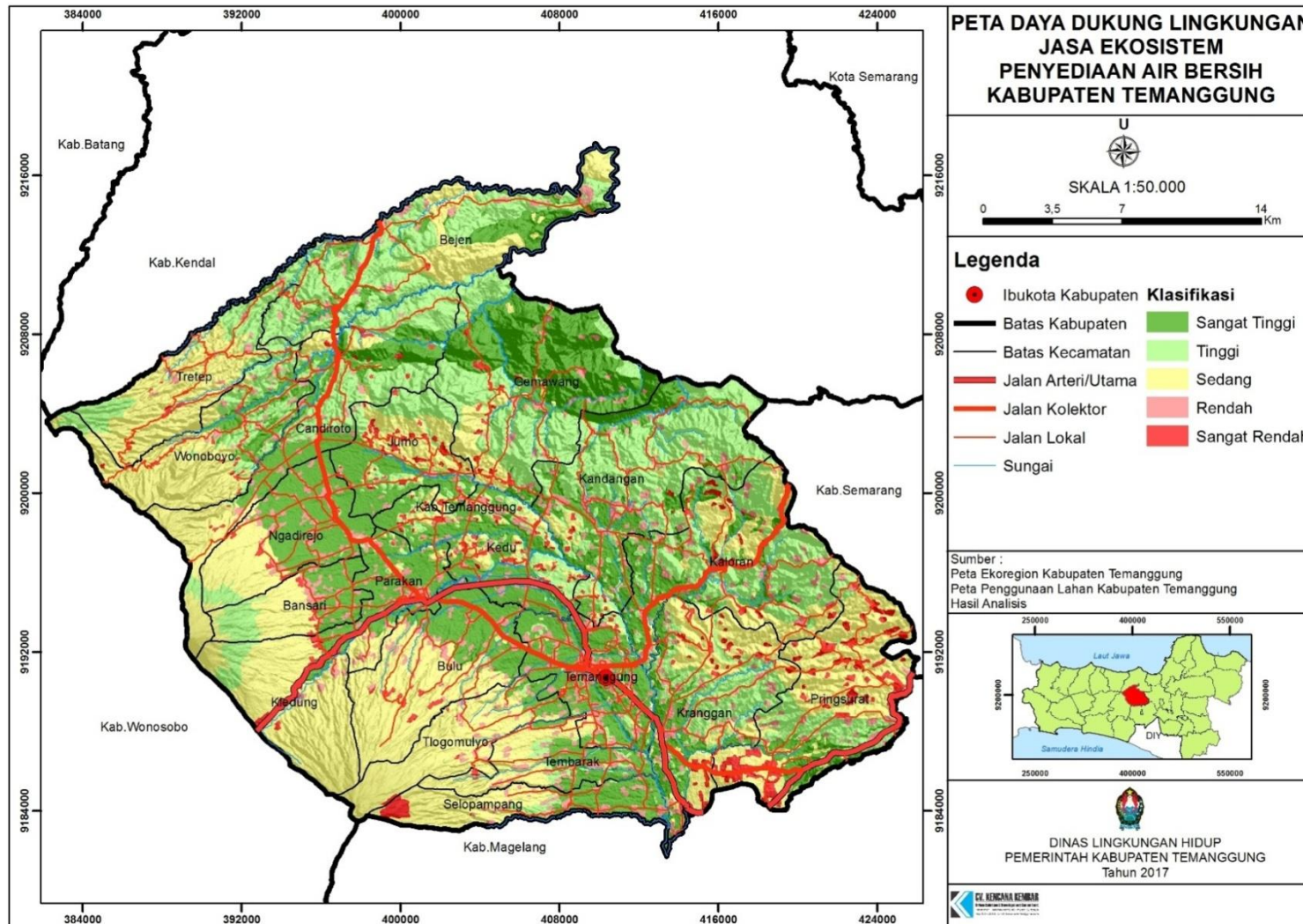
Tabel 4.51 Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Luas (Ha)						Persentase (%)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari	40.07	214.12	790.40	354.95	660.40	2,059.94	1.95	10.39	38.37	17.23	32.06
Bejen	18.51	387.56	1,506.12	3,527.94	1,161.18	6,601.31	0.28	5.87	22.82	53.44	17.59
Bulu	82.41	416.02	2,745.82	28.67	1,414.11	4,687.03	1.76	8.88	58.58	0.61	30.17
Candiroto	97.40	264.40	1,486.98	2,247.92	1,667.12	5,763.82	1.69	4.59	25.80	39.00	28.92
Gemawang	134.00	246.94	648.22	2,661.93	3,845.33	7,536.41	1.78	3.28	8.60	35.32	51.02
Jumo	260.96	95.78	964.16	759.96	1,045.28	3,126.15	8.35	3.06	30.84	24.31	33.44
Kaloran	206.17	601.86	1,467.87	2,868.11	1,403.61	6,547.62	3.15	9.19	22.42	43.80	21.44
Kandangan	78.91	608.00	296.02	4,313.05	1,889.77	7,185.75	1.10	8.46	4.12	60.02	26.30
Kedu	262.48	337.85	574.66	696.12	1,855.55	3,726.66	7.04	9.07	15.42	18.68	49.79
Kledung	164.49	77.11	3,319.89	285.28	277.81	4,124.58	3.99	1.87	80.49	6.92	6.74
Kranggan	274.97	527.90	1,762.26	1,678.37	962.19	5,205.68	5.28	10.14	33.85	32.24	18.48
Ngadirejo	49.52	413.65	1,063.02	167.07	1,881.32	3,574.58	1.39	11.57	29.74	4.67	52.63
Parakan	7.44	409.44	331.13	87.01	1,207.89	2,042.92	0.36	20.04	16.21	4.26	59.13
Pringsurat	866.01	233.92	3,194.51	1,007.10	619.30	5,920.84	14.63	3.95	53.95	17.01	10.46
Selopampang	123.88	234.69	1,152.46	124.93	788.39	2,424.35	5.11	9.68	47.54	5.15	32.52
Temanggung	15.77	920.45	154.42	237.74	1,996.46	3,324.84	0.47	27.68	4.64	7.15	60.05
Tembarak	14.36	292.95	1,007.32	231.41	702.06	2,248.10	0.64	13.03	44.81	10.29	31.23
Tlogomulyo	23.12	178.43	2,272.10	45.33	275.84	2,794.82	0.83	6.38	81.30	1.62	9.87
Tretep	49.26	156.18	2,439.59	1,041.39	36.80	3,723.22	1.32	4.19	65.52	27.97	0.99
Wonobooyo	50.50	206.40	2,195.30	1,228.93	583.86	4,265.00	1.18	4.84	51.47	28.81	13.69
<b>Total</b>	<b>2,820.23</b>	<b>6,823.63</b>	<b>29,372.26</b>	<b>23,593.20</b>	<b>24,274.27</b>	<b>86,883.59</b>	<b>3.25</b>	<b>7.85</b>	<b>33.81</b>	<b>27.15</b>	<b>27.94</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2017



**Gambar 4.5. Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung**



**Gambar 4.6** Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Temanggung

**c. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir**

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (*evaporasi*), pendinginan massa udara (*kondensasi*), hujan (*presipitasi*), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 34,38% luas wilayah atau 29.874 hektar. Potensi tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir mencapai 19.399,08 hektar atau 22,33%. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 7,93% dari luas Temanggung atau 6.891 hektar. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural lipatan dan patahan mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan tata aliran air dan banjir. **Tabel 4.53, Gambar 4.7** dan **Gambar 4.8** menunjukkan luasan lahan dan prosentase untuk Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir.

Ekoregion dataran aluvial seperti Kledung, serta areal dataran kaki gunungapi dan kerucut lereng gunung api Sindoro dan Sumbing mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan ini. Ekoregion pegunungan/perbukitan struktural mempunyai potensi akan tetapi tidak setinggi ekoregion sebelumnya. Karakteristik jenis tanah dan batuan akan mempengaruhi potensi untuk mengatur tata air dan banjir.

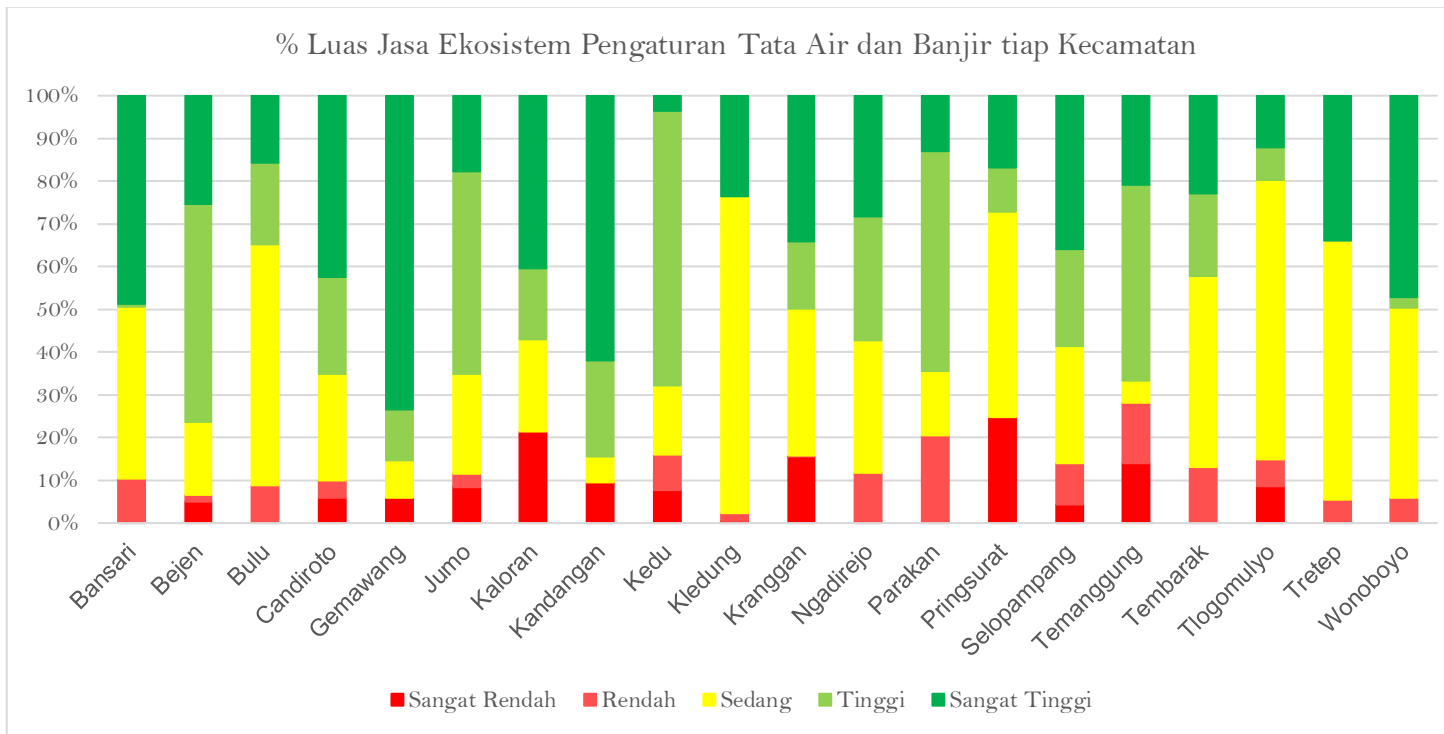
Wilayah Temanggung secara garis besar memiliki kapasitas yang tinggi dalam pengaturan tata aliran air dan banjir. Kondisinya yang berupa pegunungan dengan suhu sejuk dan juga punggung bukit struktural mendukung tata aliran air dan banjir. Kerapatan vegetasi yang rendah seperti yang terlihat pada wilayah perkotaan Temanggung, luas dan tajuk yang sempit membuat volume air hujan yang ditahan tidak sebesar di kawasan hutan lindung dan juga hutan produksi. Kondisi ini membuat air hujan yang langsung masuk menuju ke tanah akan lebih besar. Potensi untuk pengaturan tata air dan banjir akan berkurang. Dataran aluvial yang sudah menjadi permukiman mempunyai potensi rendah dan sangat rendah. Sebagian besar permukaan tanah sudah diperkeras sehingga air hujan langsung menuju ke sungai atau menggenang.

**Tabel 4.53 Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Temanggung**

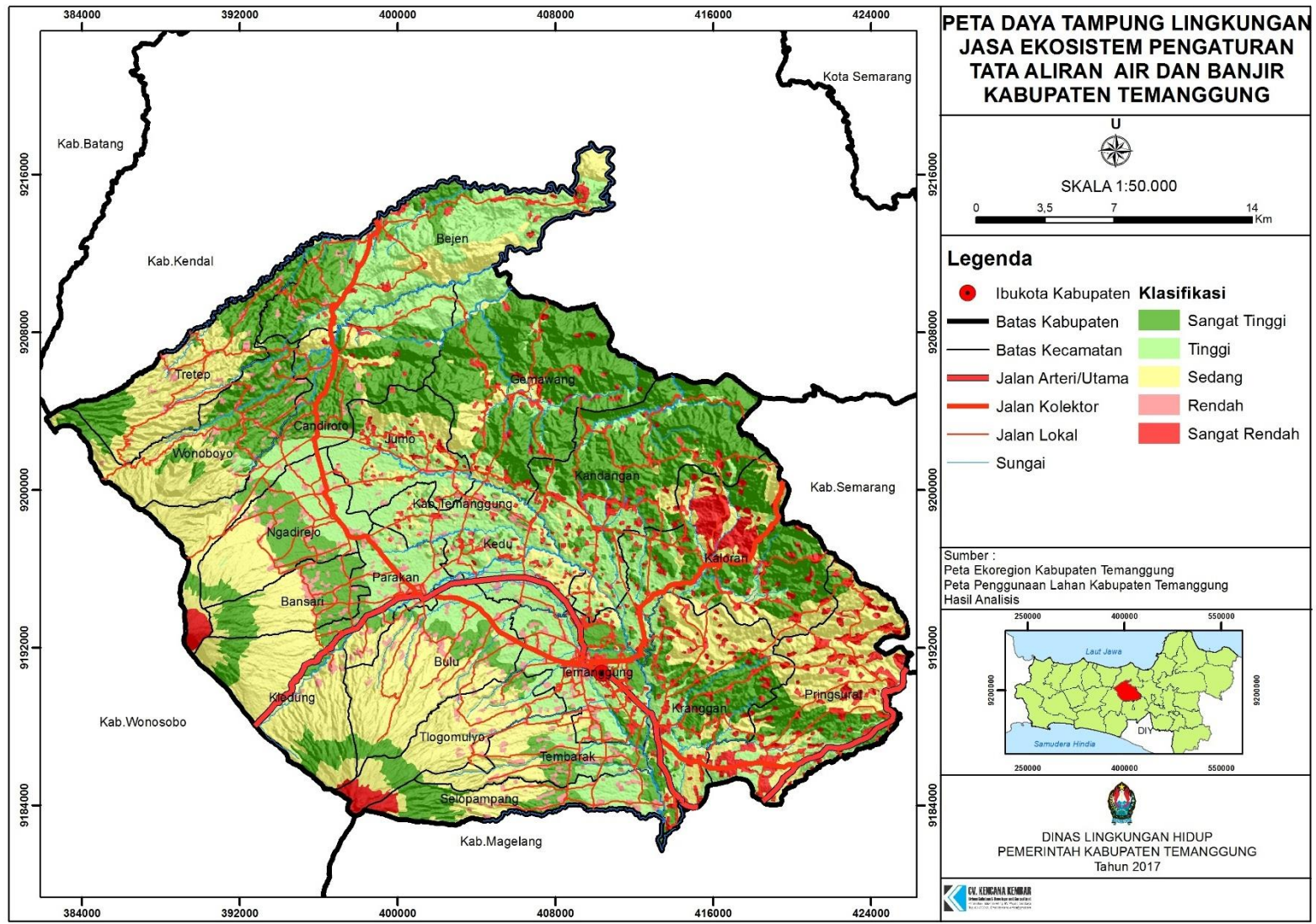
Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari	1.81	214.12	828.66	10.13	1,005.22	2,059.94	0.09	10.39	40.23	0.49	48.80
Bejen	330.05	101.25	1,137.26	3,359.27	1,673.49	6,601.31	5.00	1.53	17.23	50.89	25.35
Bulu		416.02	2,639.79	899.16	732.06	4,687.03	0.00	8.88	56.32	19.18	15.62
Candiroto	336.87	240.93	1,430.86	1,313.24	2,441.92	5,763.82	5.84	4.18	24.82	22.78	42.37
Gemawang	447.37		662.65	894.77	5,531.62	7,536.41	5.94	0.00	8.79	11.87	73.40
Jumo	262.65	95.78	733.45	1,481.80	552.47	3,126.15	8.40	3.06	23.46	47.40	17.67
Kaloran	1,407.29		1,399.84	1,100.19	2,640.31	6,547.62	21.49	0.00	21.38	16.80	40.32
Kandangan	688.48		436.84	1,609.40	4,451.02	7,185.75	9.58	0.00	6.08	22.40	61.94
Kedu	289.64	308.45	601.21	2,398.84	128.51	3,726.66	7.77	8.28	16.13	64.37	3.45
Kledung	17.64	77.11	3,058.13		971.70	4,124.58	0.43	1.87	74.14	0.00	23.56
Kranggan	814.74	8.16	1,788.62	817.28	1,776.89	5,205.68	15.65	0.16	34.36	15.70	34.13
Ngadirejo	8.09	413.65	1,103.25	1,042.48	1,007.11	3,574.58	0.23	11.57	30.86	29.16	28.17
Parakan	7.44	409.44	310.29	1,048.26	267.49	2,042.92	0.36	20.04	15.19	51.31	13.09
Pringsurat	1,473.29		2,846.16	601.42	999.96	5,920.84	24.88	0.00	48.07	10.16	16.89
Selopampang	104.72	234.69	666.31	547.44	871.20	2,424.35	4.32	9.68	27.48	22.58	35.94
Temanggung	463.72	474.44	170.30	1,520.64	695.74	3,324.84	13.95	14.27	5.12	45.74	20.93
Tembarak		292.95	1,004.62	436.67	513.86	2,248.10	0.00	13.03	44.69	19.42	22.86
Tlogomulyo	237.62	178.43	1,828.56	212.85	337.36	2,794.82	8.50	6.38	65.43	7.62	12.07
Tretep		205.44	2,254.51	0.01	1,263.26	3,723.22	0.00	5.52	60.55	0.00	33.93
Wonoboyo		256.90	1,889.89	105.23	2,012.98	4,265.00	0.00	6.02	44.31	2.47	47.20
<b>Total</b>	<b>6,891.42</b>	<b>3,927.75</b>	<b>26,791.20</b>	<b>19,399.08</b>	<b>29,874.14</b>	<b>86,883.59</b>	<b>7.93</b>	<b>4.52</b>	<b>30.84</b>	<b>22.33</b>	<b>34.38</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2017





**Gambar 4.7. Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung**



**Gambar 4.8** Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

**d. Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana**

Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

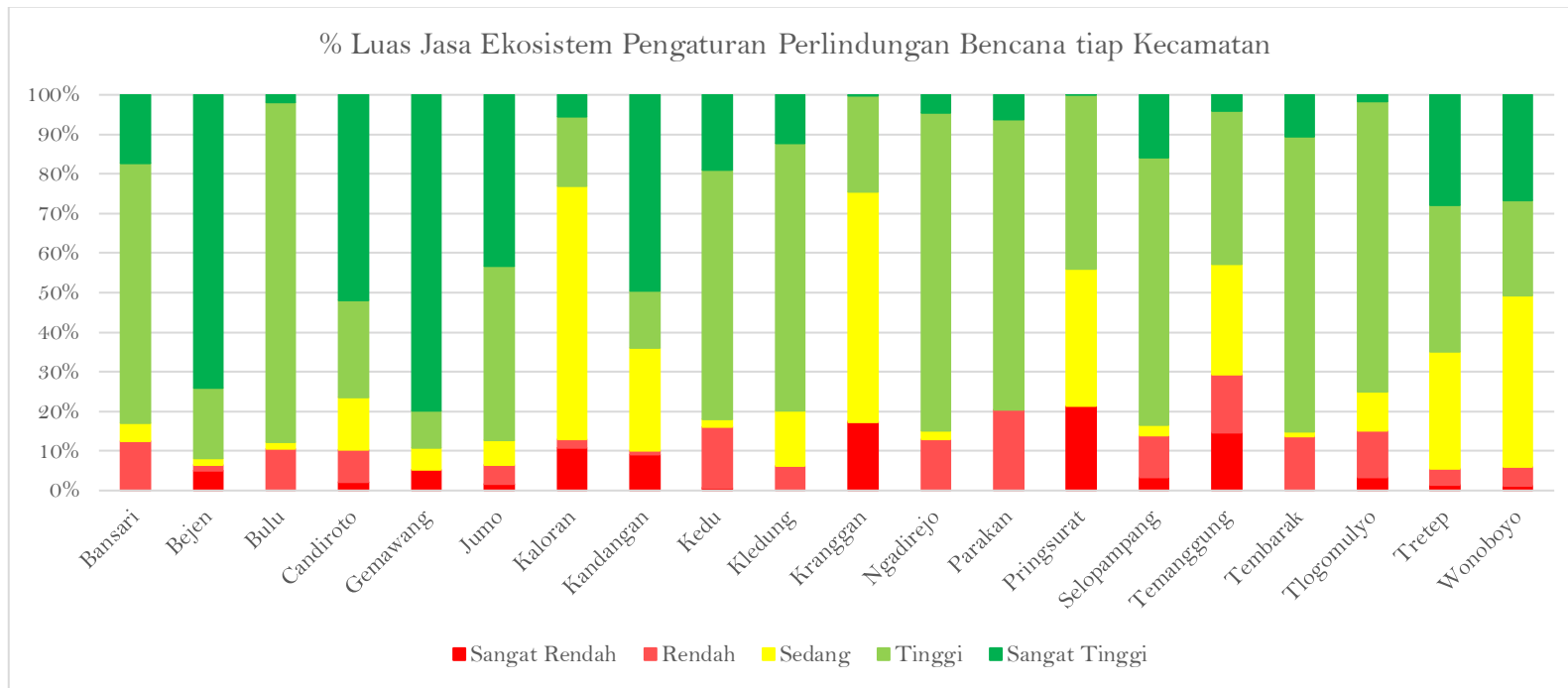
Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mencapai 27,74% luas wilayah atau 24.099 hektar dengan luas tertinggi berada di wilayah Kecamatan Gemawang.

Potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 34.654 hektar atau 39,89%. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 5,99% dari luas Kabupaten Temanggung atau 5.200,34 hektar dengan luas terbesar di Kecamatan Pringsurat. Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Bencana yang mengancam Kabupaten Temanggung antara lain tanah longsor, kekeringan, banjir dan angin puting beliung. Tabel 4.54, Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 menunjukkan luasan lahan dan prosentase untuk Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana.

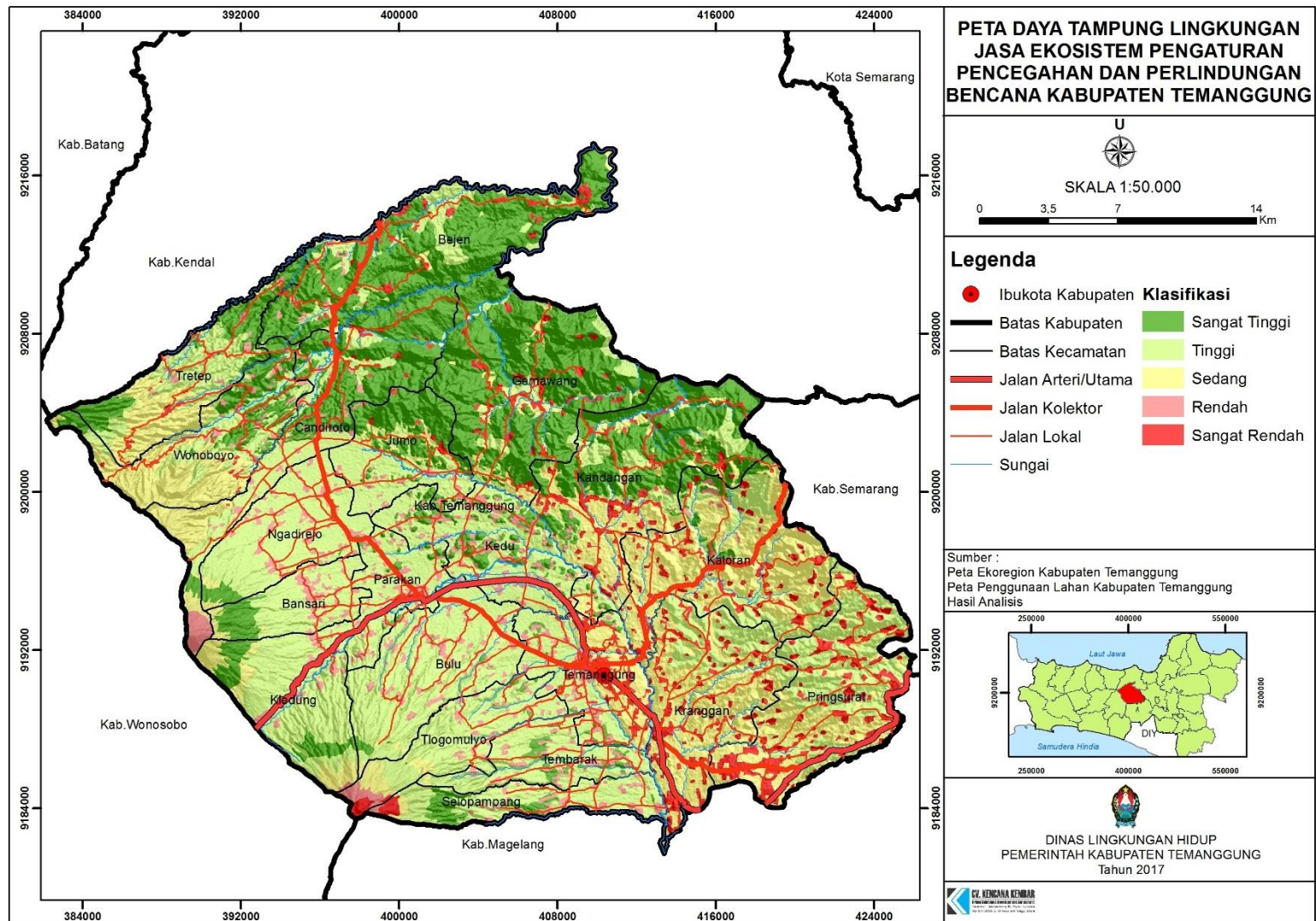
**Tabel 4.54. Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana di Kabupaten Temanggung**

Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari		256.00	94.58	1,354.41	354.95	2,059.94	0.00	12.43	4.59	65.75	17.23
Bejen	330.05	101.25	103.57	1,171.19	4,895.25	6,601.31	5.00	1.53	1.57	17.74	74.16
Bulu		498.44	75.37	4,028.59	84.62	4,687.03	0.00	10.63	1.61	85.95	1.81
Candiroto	124.28	464.81	766.20	1,414.75	2,993.78	5,763.82	2.16	8.06	13.29	24.55	51.94
Gemawang	395.42		425.21	696.08	6,019.70	7,536.41	5.25	0.00	5.64	9.24	79.87
Jumo	51.81	149.21	197.06	1,375.13	1,352.94	3,126.15	1.66	4.77	6.30	43.99	43.28
Kaloran	700.04	141.84	4,200.78	1,149.42	355.55	6,547.62	10.69	2.17	64.16	17.55	5.43
Kandangan	655.16	70.77	1,869.25	1,035.31	3,555.26	7,185.75	9.12	0.98	26.01	14.41	49.48
Kedu	29.40	566.38	78.03	2,348.57	704.28	3,726.66	0.79	15.20	2.09	63.02	18.90
Kledung		259.24	568.94	2,791.77	504.63	4,124.58	0.00	6.29	13.79	67.69	12.23
Kranggan	895.13	8.16	3,031.13	1,260.31	10.97	5,205.68	17.20	0.16	58.23	24.21	0.21
Ngadirejo		463.17	74.80	2,873.03	163.58	3,574.58	0.00	12.96	2.09	80.37	4.58
Parakan		416.88		1,500.57	125.46	2,042.92	0.00	20.41	0.00	73.45	6.14
Pringsurat	1,260.45		2,058.07	2,602.28	0.03	5,920.84	21.29	0.00	34.76	43.95	0.00
Selopampang	78.82	261.27	64.13	1,635.49	384.64	2,424.35	3.25	10.78	2.65	67.46	15.87
Temanggung	487.21	490.21	926.40	1,286.95	134.07	3,324.84	14.65	14.74	27.86	38.71	4.03
Tembarak		307.31	26.80	1,677.19	236.80	2,248.10	0.00	13.67	1.19	74.60	10.53
Tlogomulyo	92.82	332.36	275.24	2,047.80	46.60	2,794.82	3.32	11.89	9.85	73.27	1.67
Tretep	49.26	156.18	1,102.21	1,374.19	1,041.38	3,723.22	1.32	4.19	29.60	36.91	27.97
Wonoboyo	50.50	206.40	1,842.14	1,031.28	1,134.68	4,265.00	1.18	4.84	43.19	24.18	26.60
<b>Total</b>	<b>5,200.34</b>	<b>5,149.85</b>	<b>17,779.90</b>	<b>34,654.31</b>	<b>24,099.18</b>	<b>86,883.59</b>	<b>5.99</b>	<b>5.93</b>	<b>20.46</b>	<b>39.89</b>	<b>27.74</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2017



**Gambar 4.9. Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung**



**Gambar 4.10 Peta Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana**

**e. Jasa ekosistem pengaturan pengelolaan dan penguraian air limbah**

Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi tinggi untuk pengaturan pengelolaan dan penguraian air limbah. Lahan yang berpotensi tinggi dengan luasan mencapai 41,18% luas wilayah atau 35.781 hektar dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Bejen. Potensi sangat tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 26.009,44 hektar atau 29,94% dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Gemawang. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 4,69% dari luas Kabupaten Temanggung atau 4.078,12 hektar dengan luas tertinggi berada di Kecamatan Bejen.

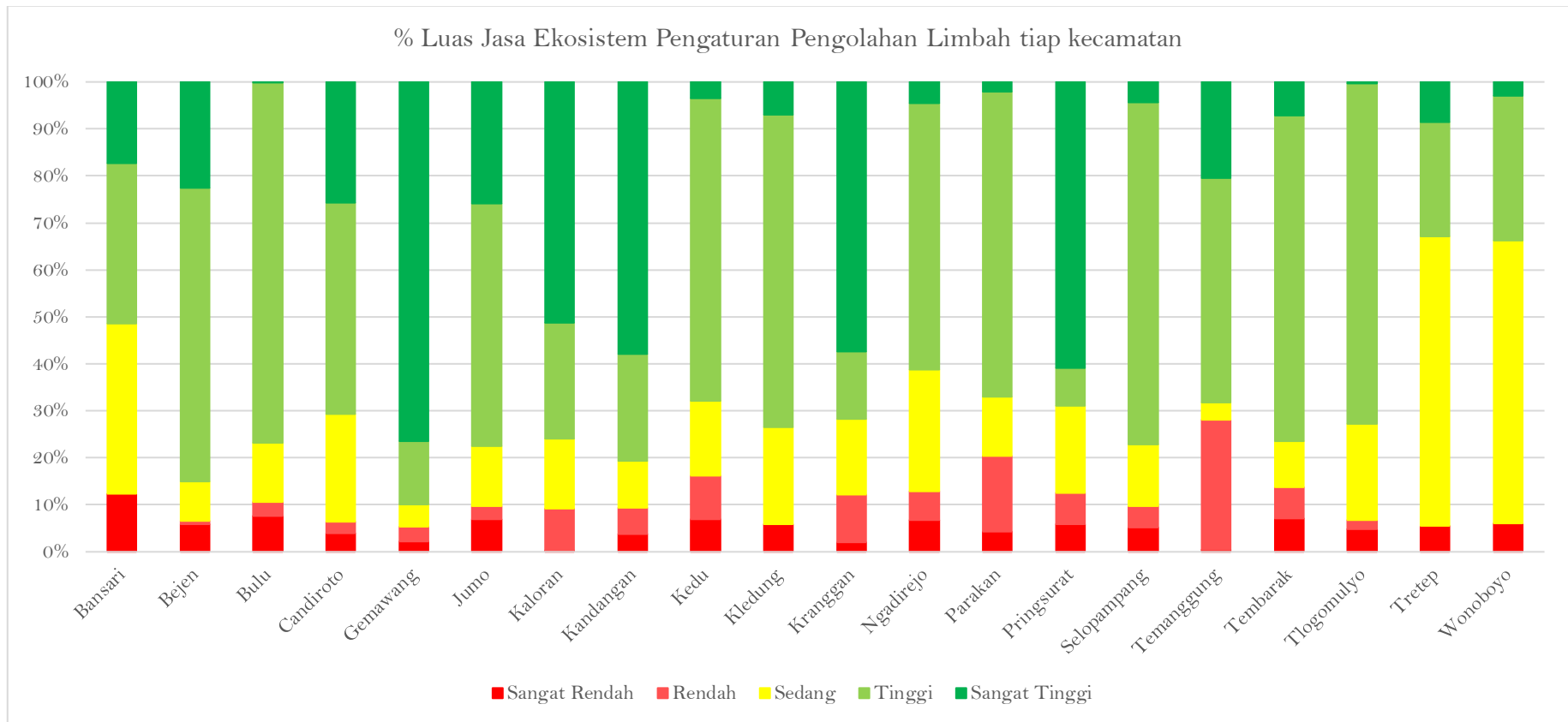
Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion dataran kaki gunungapi dan pegunungan struktural mempunyai potensi relatif tinggi. Ekoregion kerucut lereng gunung api, perbukitan struktural patahan dan lipatan, dan lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi yang rendah. Kondisi lingkungan yang alami dan jenis sampah/limbah akan mempengaruhi penguraian limbah. Kondisi yang alami akan menjamin ketersediaan bakteri atau mikroba pengurai sampah. Tabel 4.55, Gambar 4.11 dan Gambar 4.12 menunjukkan luasan lahan dan prosentase untuk jasa ekosistem pengaturan pengelolaan dan penguraian air limbah.

**Tabel 4.55. Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengelolaan dan Penguraian Air Limbah di Kabupaten Temanggung**

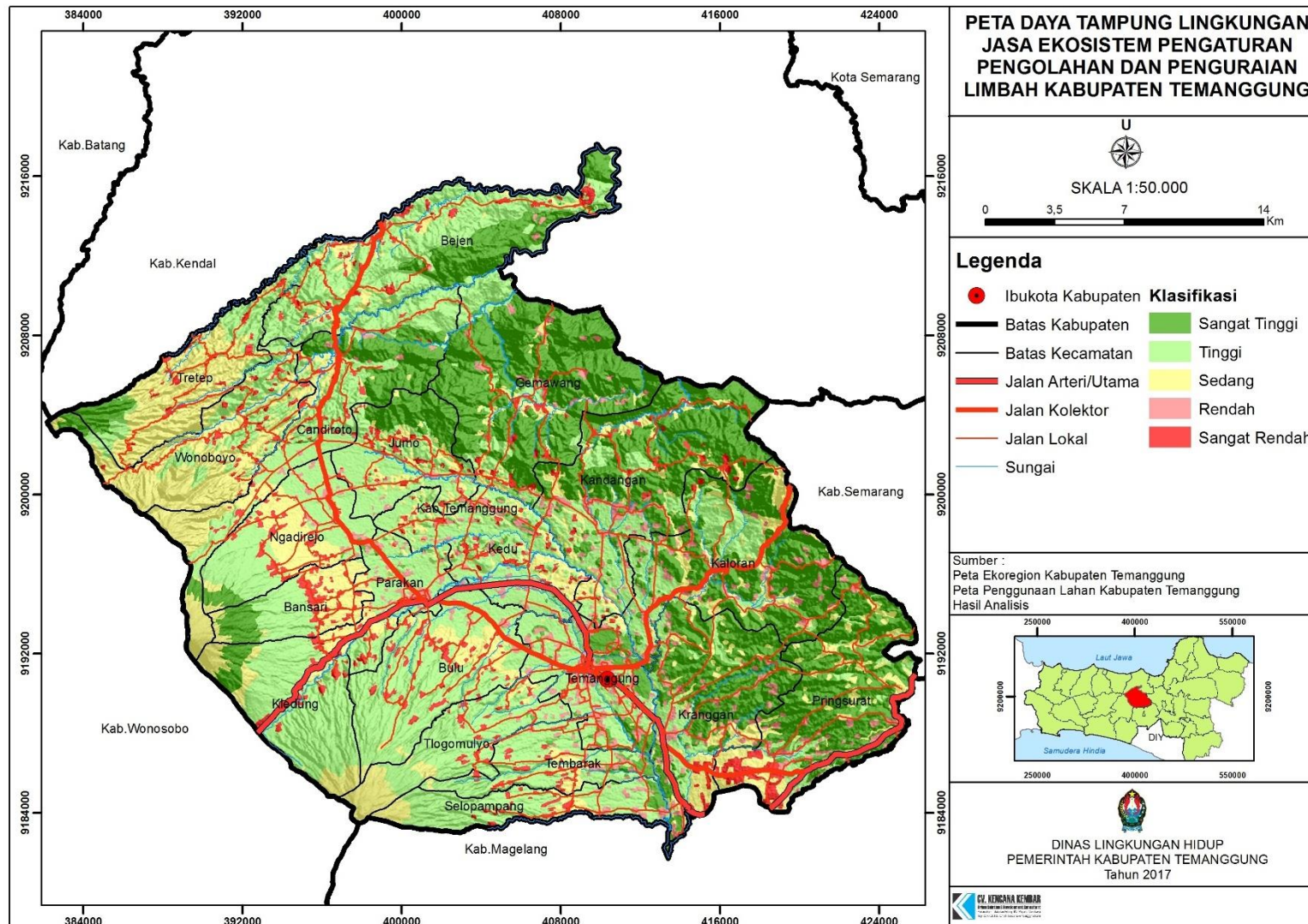
Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari	254.19	-	746.67	704.14	354.95	2,059.94	12.34	0.00	36.25	34.18	17.23
Bejen	387.56	43.73	561.70	4,117.24	1,491.07	6,601.31	5.87	0.66	8.51	62.37	22.59
Bulu	358.08	140.35	586.51	3,595.86	6.22	4,687.03	7.64	2.99	12.51	76.72	0.13
Candiroto	225.21	139.58	1,323.84	2,593.24	1,481.94	5,763.82	3.91	2.42	22.97	44.99	25.71
Gemawang	164.25	240.29	353.15	1,018.32	5,760.40	7,536.41	2.18	3.19	4.69	13.51	76.43
Jumo	215.46	89.48	399.45	1,612.20	809.57	3,126.15	6.89	2.86	12.78	51.57	25.90
Kaloran	20.44	586.47	972.27	1,614.31	3,354.13	6,547.62	0.31	8.96	14.85	24.65	51.23
Kandangan	275.07	402.25	713.02	1,640.38	4,155.03	7,185.75	3.83	5.60	9.92	22.83	57.82
Kedu	257.93	344.72	596.66	2,399.41	127.95	3,726.66	6.92	9.25	16.01	64.38	3.43
Kledung	241.60	-	856.06	2,741.64	285.28	4,124.58	5.86	0.00	20.76	66.47	6.92
Kranggan	108.65	527.90	836.98	748.93	2,983.22	5,205.68	2.09	10.14	16.08	14.39	57.31
Ngadirejo	241.87	221.30	921.82	2,026.13	163.47	3,574.58	6.77	6.19	25.79	56.68	4.57
Parakan	87.07	329.81	255.62	1,329.21	41.20	2,042.92	4.26	16.14	12.51	65.06	2.02
Pringsurat	344.33	394.44	1,102.54	477.24	3,602.27	5,920.84	5.82	6.66	18.62	8.06	60.84
Selopampang	125.71	109.67	317.86	1,767.90	103.21	2,424.35	5.19	4.52	13.11	72.92	4.26
Temanggung	15.91	920.31	121.11	1,589.73	677.77	3,324.84	0.48	27.68	3.64	47.81	20.39
Tembarak	158.72	148.59	222.62	1,556.09	162.08	2,248.10	7.06	6.61	9.90	69.22	7.21
Tlogomulyo	133.73	53.82	575.86	2,022.01	9.40	2,794.82	4.79	1.93	20.60	72.35	0.34
Tretep	205.44	-	2,291.32	910.38	316.08	3,723.22	5.52	0.00	61.54	24.45	8.49
Wonoboyo	256.90	-	2,566.75	1,317.14	124.21	4,265.00	6.02	0.00	60.18	30.88	2.91
<b>Total</b>	<b>4,078.12</b>	<b>4,692.71</b>	<b>16,321.81</b>	<b>35,781.50</b>	<b>26,009.44</b>	<b>86,883.59</b>	<b>4.69</b>	<b>5.40</b>	<b>18.79</b>	<b>41.18</b>	<b>29.94</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2017





**Gambar 4.11. Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengelolaan dan Penguraian Air Limbah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung**



**Gambar 4.12. Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pengelolaan dan Penguraian Air Limbah**

**f. Jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara**

Kualitas udara yang baik merupakan salahsatu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara . sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor -faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

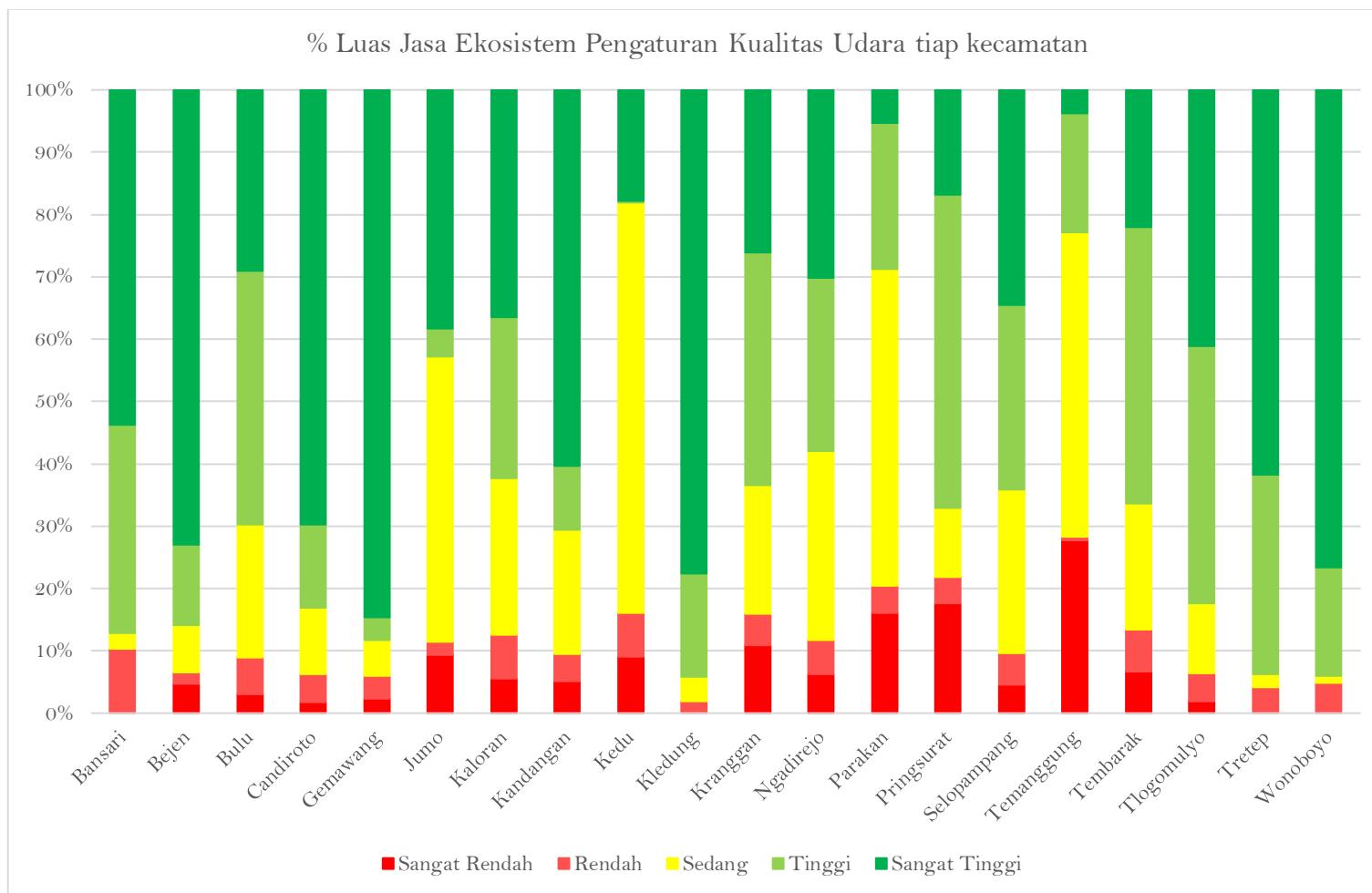
Wilayah Kabupaten Temanggung secara umum mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dengan luasan mencapai 47,40% luas wilayah atau 41.180, 75 hektar dengan luasan tertinggi berada di Kecamatan Gemawang. Potensi tinggi untuk pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana mencapai 19.562,94 hektar atau 22,52% dengan wilayah paling luas untuk nilai ini berada di Kecamatan Pringsurat. Lahan yang berpotensi sangat rendah hanya 6,31% dari luas Kabupaten Temanggung atau 5.481,29 hektar dengan luas paling tinggi berada di Kecamatan Pringsurat.

Kondisi Temanggung yang memiliki ekoregion pegunungan struktural patahan, lipatan dan kerucut lereng gunung api mempunyai potensi tinggi. Ekoregion dataran aluvial dan lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi rendah untuk pengaturan. Tabel 4.56, Gambar 4.13 dan Gambar 4.14 menunjukkan luasan lahan dan prosentase untuk jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara.

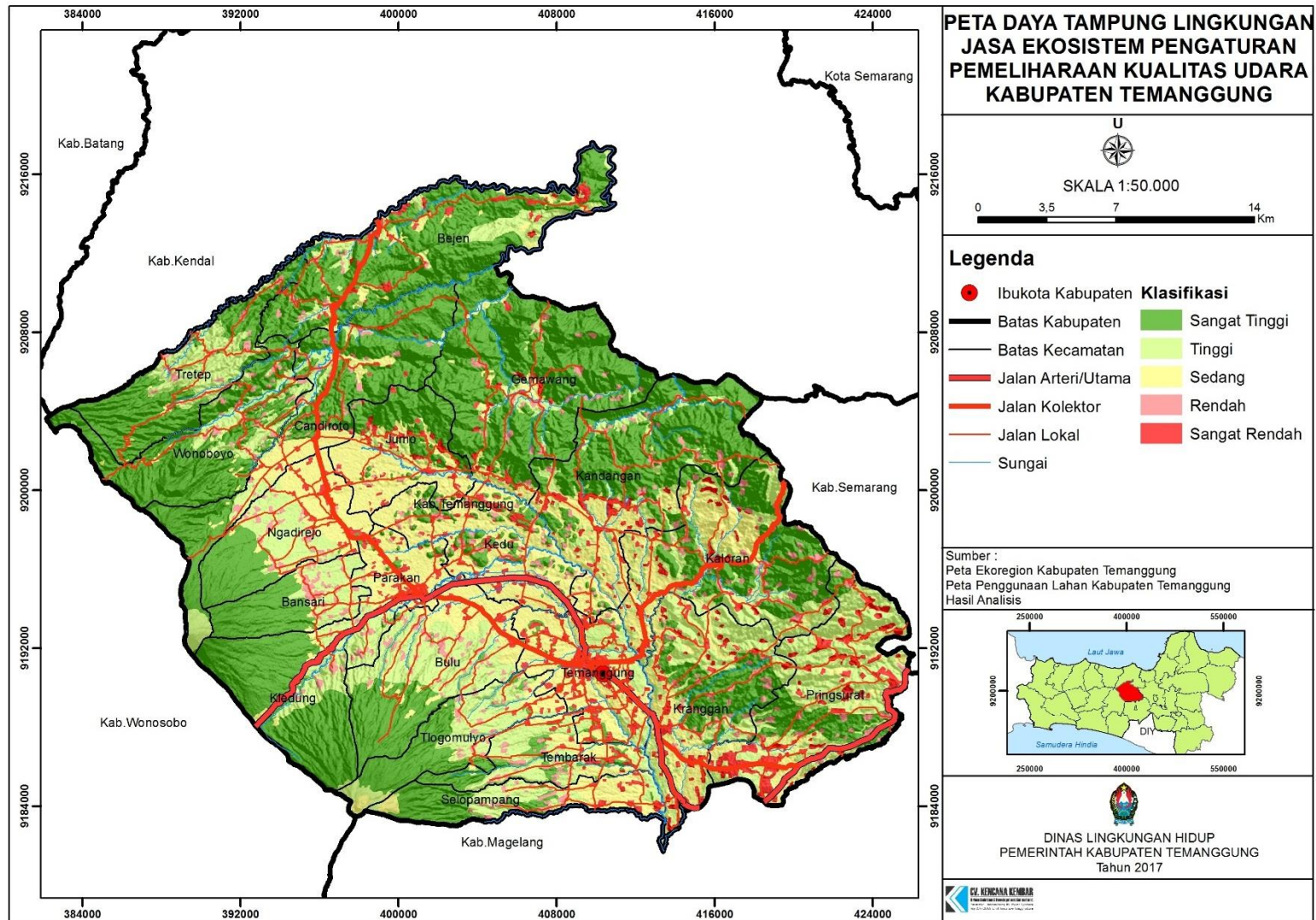
**Tabel 4.56. Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung**

Kecamatan	Luas						Persentase				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Bansari	-	214.12	50.20	690.05	1,105.57	2,059.94	0.00	10.39	2.44	33.50	53.67
Bejen	311.54	119.75	500.35	854.33	4,815.33	6,601.31	4.72	1.81	7.58	12.94	72.95
Bulu	140.35	275.67	1,002.15	1,910.26	1,358.59	4,687.03	2.99	5.88	21.38	40.76	28.99
Candiroto	100.36	259.63	613.72	767.49	4,022.61	5,763.82	1.74	4.50	10.65	13.32	69.79
Gemawang	175.11	272.26	441.44	275.31	6,372.28	7,536.41	2.32	3.61	5.86	3.65	84.55
Jumo	294.12	62.63	1,433.23	138.89	1,197.27	3,126.15	9.41	2.00	45.85	4.44	38.30
Kaloran	367.18	454.55	1,648.85	1,689.73	2,387.31	6,547.62	5.61	6.94	25.18	25.81	36.46
Kandangan	364.62	314.15	1,434.53	739.17	4,333.28	7,185.75	5.07	4.37	19.96	10.29	60.30
Kedu	337.85	262.39	2,454.62	6.62	665.19	3,726.66	9.07	7.04	65.87	0.18	17.85
Kledung	-	77.11	164.49	683.44	3,199.54	4,124.58	0.00	1.87	3.99	16.57	77.57
Kranggan	563.77	263.97	1,078.16	1,939.13	1,360.65	5,205.68	10.83	5.07	20.71	37.25	26.14
Ngadirejo	221.30	200.44	1,082.71	994.31	1,075.82	3,574.58	6.19	5.61	30.29	27.82	30.10
Parakan	329.81	87.07	1,039.74	477.36	108.93	2,042.92	16.14	4.26	50.90	23.37	5.33
Pringsurat	1,042.89	248.83	661.22	2,967.90	999.99	5,920.84	17.61	4.20	11.17	50.13	16.89
Selopampang	109.67	125.02	633.50	718.04	838.13	2,424.35	4.52	5.16	26.13	29.62	34.57
Temanggung	920.31	20.76	1,622.03	634.93	126.81	3,324.84	27.68	0.62	48.79	19.10	3.81
Tembarak	148.59	152.11	456.53	995.20	495.66	2,248.10	6.61	6.77	20.31	44.27	22.05
Tlogomulyo	53.82	124.61	314.80	1,154.30	1,147.29	2,794.82	1.93	4.46	11.26	41.30	41.05
Tretep	-	156.18	78.18	1,189.11	2,299.75	3,723.22	0.00	4.19	2.10	31.94	61.77
Wonobojo	-	206.40	50.51	737.36	3,270.73	4,265.00	0.00	4.84	1.18	17.29	76.69
<b>Total</b>	<b>5,481.29</b>	<b>3,897.65</b>	<b>16,760.96</b>	<b>19,562.94</b>	<b>41,180.75</b>	<b>86,883.59</b>	<b>6.31</b>	<b>4.49</b>	<b>19.29</b>	<b>22.52</b>	<b>47.40</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2017



**Gambar 4.13. Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung**



**Gambar 4.14. Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara**

#### 4.1.4.5. Implementasi kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

##### a. Kesesuaian Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung

**Tabel 4.57. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan**

Pola Ruang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Hutan Lindung	2449,40	914,97	11,65	50,26	1,23	3427,52
Hutan Produksi	5,00	237,29	6127,54	555,65	18,81	6944,29
Hutan Produksi Terbatas	1100,87	1009,06	906,21	195,80	1,26	3213,20
Kawasan Peruntukan Industri	116,54	140,23	503,79	12,59	423,03	1196,18
Kawasan Peruntukan Perlindungan Bawahannya	562,92	265,16	7826,29	2622,20	1053,01	12329,59
Kawasan Peruntukan Permukiman	1952,03	3096,96	363,22	223,69	1259,82	6895,72
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	550,76	1729,90	124,75	110,45	2329,51	4845,36
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	60,38	216,07	880,81	1853,73	13329,97	16340,95
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	736,44	873,71	15660,25	7314,93	7160,32	31745,64
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	0,00	0,05	0,00	0,00	9,60	9,64

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Hasil penghitungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa klasifikasi jasa ekosistem yang tertinggi berada pada peruntukan kawasan pertanian lahan basah dengan luas 13.329,97 hektar atau 82% dari luasan total peruntukan kawasan pertanian lahan basah. Sedangkan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah paling luas terdapat pada peruntukan hutan lindung yakni 2.449 hektar atau 72% dari total luasan peruntukan hutan lindung pada pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam review dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 memiliki pola yang sama dengan hasil perhitungan daya dukung untuk jasa ekosistem pangan.

**Tabel 4.58. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih**

Pola Ruang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Hutan Lindung	137,17	0,00	2876,66	413,68	0,00	3427,52
Hutan Produksi	1,87	3,75	1318,12	4011,38	1609,17	6944,29
Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,23	1915,01	1160,53	137,44	3213,20
Kawasan Peruntukan Industri	86,28	38,73	393,09	307,51	370,58	1196,18

Kawasan Peruntukan Perlindungan Bawahannya	236,81	476,82	5443,21	3930,43	2242,31	12329,59
Kawasan Peruntukan Permukiman	1339,01	3571,30	563,88	417,16	1004,37	6895,72
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	504,44	1574,49	436,08	331,52	1998,83	4845,36
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	49,22	204,00	1411,02	1535,52	13141,19	16340,95
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	466,07	955,49	15005,85	11485,55	3832,68	31745,64
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	0,00	0,05	9,60	0,00	0,00	9,64

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Hasil penghitungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa klasifikasi jasa ekosistem penyedia air bersih yang tertinggi berada pada peruntukan kawasan pertanian lahan basah dengan luas 13.141,19 hektar atau 95% dari luasan total peruntukan kawasan pertanian lahan basah. Sedangkan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah paling luas terdapat pada peruntukan lahan permukiman yakni 1.339,01 hektar atau 15% dari total luasan peruntukan lahan permukiman pada pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam review dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 memiliki pola yang sama dengan hasil perhitungan daya dukung untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih.

**Tabel 4.59. Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup**

Pola Ruang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Hutan Lindung	3376,03	50,26	0,00	1,23	0,00	3427,52
Hutan Produksi	6214,60	671,86	56,60	0,63	0,60	6944,29
Hutan Produksi Terbatas	2916,92	284,99	11,29	0,00	0,00	3213,20
Kawasan Peruntukan Industri	339,04	479,68	47,56	320,84	9,06	1196,18
Kawasan Peruntukan Perlindungan Bawahannya	6068,35	4388,03	879,35	978,47	15,38	12329,59
Kawasan Peruntukan Permukiman	162,71	970,66	2530,09	2156,92	1075,33	6895,72
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	184,83	895,89	1471,29	1745,55	547,81	4845,36
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	1431,27	5694,55	6860,54	2257,23	97,35	16340,95
Kawasan Peruntukan	8145,89	14171,08	4570,91	4601,30	256,45	31745,64



Pola Ruang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Pertanian Lahan Kering						
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	0,00	0,00	0,05	9,60	0,00	9,64

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Hasil penghitungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa klasifikasi jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup dengan luasan tertinggi berada pada peruntukan kawasan pertanian lahan kering dengan luas 14.171,08 hektar atau 45% dari luasan total peruntukan kawasan pertanian lahan kering. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam review dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 untuk kawasan pertanian memiliki pola yang sama dengan hasil perhitungan daya dukung untuk jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup.

**Tabel 4.60. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir**

Pola Ruang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Hutan Lindung	576,89	0,00	1108,98	0,00	1741,65	3427,52
Hutan Produksi	5,60	0,63	1116,14	2514,17	3307,77	6944,29
Hutan Produksi Terbatas	0,23	0,00	1569,87	5,29	1637,81	3213,20
Kawasan Peruntukan Industri	139,47	9,79	252,59	406,25	388,08	1196,18
Kawasan Peruntukan Perlindungan Bawahannya	501,97	216,39	5389,42	522,54	5699,27	12329,59
Kawasan Peruntukan Permukiman	2659,97	2163,00	674,80	753,97	643,98	6895,72
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	1144,56	956,54	294,21	1823,62	626,44	4845,36
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	327,13	146,58	2870,34	9227,51	3769,39	16340,95
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	1536,44	435,85	13505,50	4207,73	12060,11	31745,64
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	0,00	0,05	9,60	0,00	0,00	9,64

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Hasil penghitungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa klasifikasi jasa ekosistem penyedia air bersih yang tertinggi berada pada peruntukan kawasan pertanian lahan kering dengan luas 13.141,19 hektar atau 43% dari luasan total peruntukan kawasan pertanian lahan kering. Sedangkan klasifikasi jasa ekosistem sangat

rendah paling luas terdapat pada peruntukan lahan permukiman yakni 2.659,97 hektar atau 39% dari total luasan peruntukan lahan permukiman pada pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam review dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 memiliki pola yang sama dengan hasil perhitungan daya dukung untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih.

**Tabel 4.61. Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Bencana**

<b>Pola Ruang</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Total</b>
Hutan Lindung	171,60	405,29	1057,49	884,29	908,85	3427,52
Hutan Produksi	5,60	0,63	47,03	725,35	6165,70	6944,29
Hutan Produksi Terbatas	0,23	0	1382,90	685,98	1144,09	3213,20
Kawasan Peruntukan Industri	121,65	9,82	973,19	90,86	0,66	1196,18
Kawasan Peruntukan Perlindungan Bawahannya	514,19	214,04	2923,85	3995,69	4681,82	12329,59
Kawasan Peruntukan Permukiman	2232,99	2699,65	522,51	1188,39	252,18	6895,72
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	1123,08	1047,40	1048,06	1398,08	228,75	4845,36
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	108,79	170,69	3804,11	11828,44	428,91	16340,95
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	923,03	603,37	6021,36	13909,60	10288,28	31745,64
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	0,00	0,05	0,00	9,60	0,00	9,64

*Sumber : Hasil Analisa, 2017*

Hasil penghitungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa klasifikasi jasa ekosistem pengaturan perlindungan bencana yang tertinggi berada pada peruntukan kawasan pertanian lahan kering dengan luas 10.288,28 hektar atau 32% dari luasan total peruntukan kawasan pertanian lahan kering. Sedangkan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah paling luas terdapat pada peruntukan lahan permukiman yakni 2.232,99 hektar atau 32% dari total luasan peruntukan lahan permukiman pada pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam review dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 memiliki pola yang sama dengan hasil perhitungan daya dukung untuk jasa ekosistem pengaturan perlindungan bencana.

**Tabel 4.62. Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer**

Pola Ruang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Hutan Lindung	88,56	0,00	662,60	1,23	2675,12	3427,52
Hutan Produksi	12,41	7,10	414,57	3511,93	2998,28	6944,29
Hutan Produksi Terbatas	0,00	0,23	470,76	0,14	2742,08	3213,20
Kawasan Peruntukan Industri	152,38	14,93	434,95	277,40	316,52	1196,18
Kawasan Peruntukan Perlindungan Bawahannya	260,20	527,13	4093,93	1768,01	5680,31	12329,59
Kawasan Peruntukan Permukiman	1981,93	3070,18	333,16	1163,48	346,96	6895,72
Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	1119,83	1034,43	565,13	1780,56	345,41	4845,36
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	89,67	190,57	4596,39	10931,93	532,39	16340,95
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	726,49	884,33	7620,56	11715,49	10798,76	31745,64
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	0,00	0,05	0,00	9,60	0,00	9,64

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Hasil penghitungan Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer terhadap rencana pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa klasifikasi jasa ekosistem pendukung produksi primer yang tertinggi berada pada peruntukan kawasan pertanian lahan kering dengan luas 10.798,76 hektar atau 34% dari luasan total peruntukan kawasan pertanian lahan kering. Sedangkan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah paling luas terdapat pada peruntukan lahan permukiman yakni 1.981,93 hektar atau 29% dari total luasan peruntukan lahan permukiman pada pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam review dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 memiliki pola yang sama dengan hasil perhitungan daya dukung untuk jasa ekosistem pendukung produksi primer

**c. Kesesuaian Terhadap Sawah Kabupaten Temanggung**

**Tabel 4.63. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan**

Lahan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Sawah	78,40	386,36	1081,77	2009,64	15693,87	19250,04

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Hasil penghitungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan terhadap klasifikasi lahan sawah terhadap daya dukung, klasifikasi jasa ekosistem yang tertinggi dengan luas 15.693,87

hektar atau 81% dan sangat rendah memiliki luasan 78,4 hektar atau 0,4% dari luasan total peruntukan kawasan sawah. Hal ini menunjukkan kawasan sawah memiliki pola yang sama dengan hasil perhitungan daya dukung untuk jasa ekosistem pangan.

#### 4.1.4.6. Jasa ekosistem penting

Nilai ekosistem penting dapat diketahui melalui rata-rata koefisien daya dukung atau daya tampung yang berfungsi untuk mengetahui potensi daya dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Tingkat kepentingan daya dukung pada jasa ekosistem diperoleh melalui rata-rata seluruh jasa ekosistem yang dikategorikan sebagai daya dukung.

Jasa ekosistem yang dikategorikan sebagai daya dukung adalah seluruh jasa penyediaan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Distribusi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem penting per kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada **Tabel 4.64** berikut.

**Tabel 4.64 Jasa Ekosistem Penting**

Kecamatan	Jasa Ekosistem Penting						
	Penting I	%	Penting II	%	Penting III	%	Total
Bansari	392.91	19.07	1,412.84	68.59	254.19	12.34	2,059.94
Bejen	5,372.61	81.39	797.41	12.08	431.29	6.53	6,601.31
Bulu	1,620.03	34.56	2,568.56	54.80	498.44	10.63	4,687.03
Candiroto	3,139.41	54.47	2,250.52	39.05	373.89	6.49	5,763.82
Gemawang	6,399.86	84.92	689.18	9.14	447.37	5.94	7,536.41
Jumo	1,351.05	43.22	1,419.80	45.42	355.30	11.37	3,126.15
Kaloran	3,348.66	51.14	2,385.88	36.44	813.08	12.42	6,547.62
Kandangan	4,656.13	64.80	1,850.85	25.76	678.77	9.45	7,185.75
Kedu	692.11	18.57	2,438.78	65.44	595.77	15.99	3,726.66
Kledung	1,090.22	26.43	2,792.76	67.71	241.60	5.86	4,124.58
Kranggan	2,966.21	56.98	1,436.61	27.60	802.87	15.42	5,205.68
Ngadirejo	314.37	8.79	2,797.04	78.25	463.17	12.96	3,574.58
Parakan	388.14	19.00	1,237.90	60.59	416.88	20.41	2,042.92
Pringsurat	3,585.54	60.56	1,074.85	18.15	1,260.45	21.29	5,920.84
Selopampang	1,179.28	48.64	930.88	38.40	314.20	12.96	2,424.35
Temanggung	681.61	20.50	1,707.01	51.34	936.22	28.16	3,324.84
Tembarak	865.46	38.50	1,075.33	47.83	307.31	13.67	2,248.10
Tlogomulyo	1,069.04	38.25	1,445.39	51.72	280.38	10.03	2,794.82
Tretep	1,226.46	32.94	2,291.32	61.54	205.44	5.52	3,723.22
Wonoboyo	1,440.58	33.78	2,567.52	60.20	256.90	6.02	4,265.00
<b>Total</b>	<b>41,779.67</b>	<b>48.09</b>	<b>35,170.41</b>	<b>40.48</b>	<b>9,933.51</b>	<b>11.43</b>	<b>86,883.59</b>

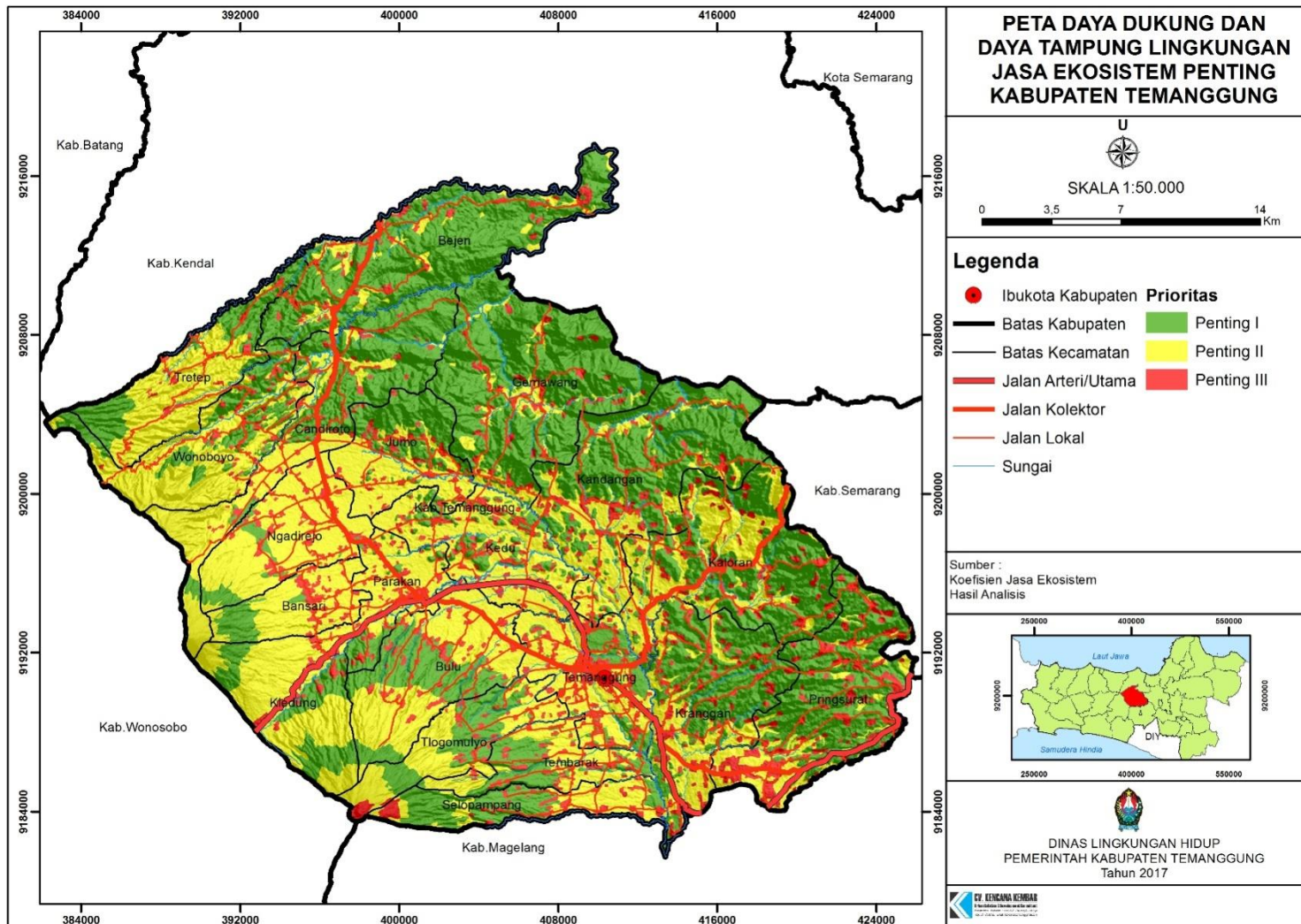
Sumber: Hasil Analisa, 2017

Pada Kabupaten Temanggung, wilayah dengan kategori Penting I dianggap hasil kajian daya dukung memiliki potensi daya dukung wilayah yang sangat besar untuk jasa

penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan. Selain itu, pada wilayah ini mendapat prioritas pertama dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung dan pengaturan. Kecamatan Gemawang sebagian besar wilayahnya atau seluas 6.399, 86 Ha merupakan wilayah dengan kategori daya dukung penting I, yang berarti wilayah Kecamatan Gemawang memiliki kemampuan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan implementasi kondisi jasa ekosistem penyediaan, budaya, pendukung dan bahkan jasa ekosistem pengaturan.

Jika dilihat secara lebih makro, 48% dari luasan kabupaten Temanggung merupakan kategori penting I, dengan luas mencapai 41.779 Ha atau mencapai hampir separuh dari luas Temanggung dapat dimanfaatkan secara maksimal menurut pembagian jasa ekosistem penyediaan, pengaturan, budaya, maupun jasa ekosistem pendukung. Luasan jasa ekosistem penting I di Kabupaten Temanggung ini terkait dengan keberadaan kawasan lindung dan strategis lingkungan pada Temanggung yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Kedua kawasan ini memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup dan memiliki pengaruh penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga kelestariannya dijaga. Rendahnya intervensi kegiatan manusia di dataran tinggi terjal di pegunungan yang mengelilingi wilayah Temanggung membuat kawasan hutan masih terjagad dengan baik. Hutan merupakan elemen utama dalam mendukung penyediaan jasa ekosistem, baik jasa ekosistem penyediaan, budaya, pengaturan maupun pendukung.

Sementara untuk wilayah dengan kategori Penting II dan Penting III merupakan wilayah dengan prioritas kedua dan ketiga dalam urutan pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, budaya, pendukung, dan pengaturan. Total kedua wilayah jenis ini mencapai 51,8% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Temanggung. Berikut merupakan **Gambar 4.15** yang merupakan peta jasa ekosistem penting di Kabupaten Temanggung.



Gambar 4.15. Peta Jasa Ekosistem Penting

## **4.2. Pengkajian dan Analisis Dampak/Risiko Lingkungan**

Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah disepaki isuisu pembangunan berkelanjutan prioritas potensial. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitung besaran dampak dari isu prioritas. Kajian pengaruh dan evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 dan di PP No. 46 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program untuk memastikan bahwa di dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **4.2.1 Penapisan KRP Berdampak**

Penapisan KRP Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 dilakukan dengan mengacu pada penjelasan pasal 15, ayat (2), huruf b UU 32 Tahun 2009 dan pasal 3 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 terkait dengan; (a) perubahan iklim; (b) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; (c) peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; (d) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; (e) peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; (f) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau (g) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Selanjutnya, kajian dan analisis dampak/resiko lingkungan untuk menapis KRP Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 yang berdampak, juga menggunakan pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 terkait dengan muatan KRP; (a) Penurunan atau terlampauinya DDDT LH untuk pembangunan; (b) Penurunan kinerja layanan jasa ekosistem; (c) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsir, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan; (d) Penurunan Mutu dan Ketersediaan SDA; (e) Penurunan Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; (f) Peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (g) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; (i) Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dan/atau; (j) Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. Hasilnya diperoleh KRP strategis dan KRP yang berdampak signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup sebanyak 8 program. Pemberian nilai pada tabel dibawah ini menggunakan (+) yang berarti tidak berdampak dan (-) yang berarti KRP tersebut berdampak negatif serta 0 karena tidak dikaji.

Tabel 4.65  
Identifikasi KRP RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023  
Dengan Dampak/Resiko Lingkungan

KRP	Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Pasal 15 UU 32 Tahun 2009/PP 46 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2							Keterangan
		Perubahan Iklim	Biodiversity	Intensitas dan cakupan Wil. Banjir	Penurunan mutu dan kelimpahan SDA	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin	Resiko kesehatan dan keselamatan manusia	
<b>VISI</b>	Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem	-	-	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya</li> <li>2. Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan</li> <li>3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</li> </ol>	-	-	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
<b>TUJUAN</b>		-	+	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut



<b>MISI 1</b>	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya								
<b>MISI 2</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas								
<b>MISI 3</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Infomasi								

KRP	Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Pasal 15 UU 32 Tahun 2009/PP 46 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2							Keterangan
		Perubahan Iklim	Biodiversity	Intensitas dan cakupan Wil. Banjir	Penurunan mutu dan kelimpahan SDA	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin	Resiko kesehatan dan keselamatan manusia	
SASARAN		-	+	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
MISI 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya budaya baca masyarakat</li> <li>3. Meningkatnya pendidikan keagamaan di masyarakat</li> <li>4. Meningkatnya prestasi olah raga, pemuda, dan seni budaya</li> <li>5. Menurunnya angka kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>6. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</li> <li>7. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan</li> </ol>								

	terhadap perempuan dan anak								
MISI 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesejahteraan petani</li> <li>2. Meningkatnya kedaulatan pangan</li> <li>3. Meningkatnya pariwisata daerah</li> <li>4. Meningkatnya investasi sektor riil</li> <li>5. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah</li> <li>6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</li> </ol>								
MISI 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan public</li> <li>4. Meningkatnya nilai wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum</li> <li>5. Meningkatnya kapasitas</li> </ol>								

	kelembagaan penanggulangan bencana								
STRATEGI		-	+	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
MISI 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda</li> <li>3. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>4. Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB</li> <li>5. Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak</li> </ol>								
MISI 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul</li> </ol>								

MISI 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata</li> <li>3. Mengoptimalkan enterpreneurship masyarakat dan promosi investasi</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang</li> <li>5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi</li> <li>2. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat</li> <li>3. Inovasi percepatan pelayanan public</li> </ul>								
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum 5. Optimalisasi mitigasi bencana								
PROGRAM PRIORITAS		+	-	+	-	-	-	-	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
MISI 1	1. Program peningkatan akses pendidikan SD; 2. Program peningkatan akses pendidikan SMP; 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 4. Program peningkatan keselamatan ibu; 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak; 6. Program perbaikan gizi masyarakat; 7. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan; 8. Program peningkatan mutu pendidikan keagamaan di masyarakat 9. Program pembinaan kepemudaan;								

MISI 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;</li> <li>11. Program pengelolaan kebudayaan</li> <li>12. Program penanganan fakir miskin;</li> <li>13. Program perlindungan dan jaminan social</li> <li>14. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga</li> <li>15. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan;</li> <li>2. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak</li> <li>3. Program peningkatan ketahanan pangan;</li> <li>4. Program pengembangan perikanan</li> </ul>								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>5. Program pengembangan kepariwisataan</p> <p>6. Program pengembangan industry</p> <p>7. Program Pengembangan Perdagangan</p> <p>8. Program Peningkatan Iklim Investasi</p> <p>9. Program perluasan kesempatan kerja</p> <p>10. Program pengembangan koperasi dan UMKM</p> <p>11. Program penyelenggaraan jalan;</p> <p>12. Program penyelenggaraan jembatan;</p> <p>13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;</p> <p>14. Program pengembangan perumahan dan permukiman;</p> <p>15. Program penyelenggaraan tata ruang;</p> <p>16. Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MISI 3	<p>17. Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup;</p> <p>18. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p> <p>1. Program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;</p> <p>2. Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik;</p> <p>3. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;</p> <p>6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;</p> <p>7. Program</p>								
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi</p> <p>8. Program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa</p> <p>9. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;</p> <p>10. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil</p> <p>11. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>12. Program pengembangan wawasan kebangsaan</p> <p>13. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Penjelasan	Pasal 15 UU 32 Tahun 2009/PP 46 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2							Nilai
			Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan dan atau kepunahan biodiversity	Peningkatan Intensitas dan cakupan Wil. Banjir, longsor, kekeringan, dan atau kebakaran hutan dan lahan	Penurunan mutu dan kelimpahan SDA	Peningkatan Alih Fungsi kawasan hutan dan atau Lahan	Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan kehidupan sekelompok masyarakat	Peningkatan Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	
	<b>INDIKASI RENCANA PROGRAM</b>									
	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>									
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kesehatan</b>									
3	Angka Harapan Hidup / AHH (Tahun)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
5	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
6	Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b><i>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</i></b>									
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>									
8	Angka Kriminalitas		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
9	Cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran masih sangat rendah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

10	Peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Sosial</b>									
11	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
12	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
13	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

16	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pangan</b>									
17	Skor Pola Pangan Harapan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pertanian</b>									
18	Fasilitasi pertanian		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>									
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
20	Sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir masih sangat rendah	Pembangunan TPA	- Pembangunan TPA akan member dampak pada perubahan iklim	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	- Dampak dari pembangunan akan menambah resiko bencana	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan TPA akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan

21	Meningkatnya pencemaran lingkungan air, udara (tutupan vegetasi/lahan)	Pembangunan IPAL	+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	+	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan
	<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
22	Indeks Infrastruktur masih rendah	Perlunya pembangunan infrastruktur	+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	+	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan
23	Masih relative tingginya bangunan yang belum ber IMB		+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan	+	- Pembangunan yang menggunakan	- Pembangunan akan menambah	+	+	Signifikan

				akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas		material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	permasalahan alih fungsi lahan			
24	Perlunya pengendalian penataan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Tenaga Kerja</b>									
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>									
26	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu



27	Prosentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.El)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
28	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>									
29	Laju Pertumbuhan Penduduk		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perhubungan</b>									
30	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
31	Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>									
32	Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

33	Desa Terhubung Internet		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
34	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public berbasis teknologi informasi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
35	Belum optimalnya integrasi system informasi daerah yang tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
36	Persentase koperasi aktif		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
37	Persentase UKM aktif		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
38	Belum optimalnya peran koperasi sebagai pelaku sektor riil		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
39	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Penanaman Modal</b>									

40	Laju Investasi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>									
41	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
42	Presentase prestasi olah raga		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Statistik</b>									
43	Ketersediaan dan keakuratan data makro dan mikro daerah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Persandian</b>									
44	Persandian dan keamanan informasi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kebudayaan</b>									
45	Pelestarian cagar budaya		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perpustakaan</b>									
46	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

47	Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kearsipan</b>									
48	Penerapan arsip secara baku		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>									
49	Tingkat konsumsi ikan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pariwisata</b>									
50	Pertumbuhan jumlah wisatawan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
51	Length of stay (lama tinggal wisatawan)	Pembangunan Destinasi Wisata, Pemeliharaan	+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	+	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan
	<b>Bidang Pertanian</b>									

52	Produktifitas Komoditas Unggulan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
53	Produktifitas Ternak Sapi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
54	Produktifitas Ternak Ayam Pedaging		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
55	Belum optimalnya pemasaran produk pertanian		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
56	Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perdagangan</b>									
57	Kontribusi sektor perdagangan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
58	Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan	Pembangunan pasar	- Pembangunan akan member dampak pada perubahan iklim	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	- Dampak dari pembangunan akan menambah resiko bencana	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan

						SDA				
	<b>Bidang Perindustrian</b>									
59	Kontribusi sektor perindustrian		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
60	Perlunya peningkatan nilai tambah komoditas pertanian unggulan di sektor industri		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perencanaan</b>									
61	Perlunya mengoptimalkan integrasi sistem e-planning dan e-budgetting		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
62	Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>									
63	Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan	+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu	+

	pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan									
64	Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan	+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu	+
	<b>Bidang Kepegawaian</b>									
65	Rasio ASN di Kabupaten Temanggung yang mengikuti diklat masih rendah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
66	Belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Keuangan</b>									
67	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Temanggung masih rendah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pengawasan</b>									

68	belum semua aparaturn pemeriksa bersertifikasi dan jumlah auditor yang masih sedikit		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Lainnya</b>									
69	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017 mendapatkan nilai CC		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
70	RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA tepat waktu sesuai prolegda		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
71	Pengesahan Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Prolegda pada setiap tahunnya		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
72	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas fasilitas publik		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu



73	Belum optimalnya bisnis proses birokrasi pelayanan publik		+	+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
----	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

Tabel 4.66  
Identifikasi KRP RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023  
Dengan Kriteria Muatan KRP

KRP	Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Kriteria Muatan KRP *									Keterangan
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
VISI	Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gadem	-			-	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut

<b>MISI</b>	4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya 5. Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	-			-	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
<b>TUJUAN</b>		-			+	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
<b>MISI 1</b>	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya										
<b>MISI 2</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas										

<b>MISI 3</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Infomasi										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRP	Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Pasal 15 UU 32 Tahun 2009/PP 46 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2							Keterangan
		Perubahan Iklim	Biodiversity	Intensitas dan cakupan Wil. Banjir	Penurunan mutu dan kelimpahan SDA	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Peningkatan juml penddk miskin	Resiko kesehatan dan keselamatan manusia	
SASARAN		-	+	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut

MISI 1	8. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat 9. Meningkatnya budaya baca masyarakat 10. Meningkatnya pendidikan keagamaan di masyarakat 11. Meningkatnya prestasi olah raga, pemuda, dan seni budaya 12. Menurunnya angka kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan social 13. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 14. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak								
MISI 2	7. Meningkatnya kesejahteraan petani 8. Meningkatnya kedaulatan pangan 9. Meningkatnya pariwisata daerah								

MISI 3	10. Meningkatnya investasi sektor riil 11. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah 12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  6. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan 7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa 8. Meningkatnya kualitas pelayanan public 9. Meningkatnya nilai wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum 10. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana								
STRATEGI		-	+	-	+	+	+	+	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut

MISI 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan</li> <li>7. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda</li> <li>8. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>9. Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB</li> <li>10. Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak</li> </ul>								
MISI 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul</li> <li>7. Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata</li> <li>8. Mengoptimalkan enterpreneurship masyarakat dan promosi investasi</li> <li>9. Meningkatkan</li> </ul>								

MISI 3	<p>ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang</p> <p>10. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang</p> <p>6. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi</p> <p>7. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat</p> <p>8. Inovasi percepatan pelayanan public</p> <p>9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum</p> <p>10. Optimalisasi</p>								
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	mitigasi bencana								
PROGRAM PRIORITAS		+	-	+	-	-	-	-	Signifikan perlu di kaji lebih lanjut
MISI 1	16. Program peningkatan akses pendidikan SD; 17. Program peningkatan akses pendidikan SMP; 18. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 19. Program peningkatan keselamatan ibu; 20. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak; 21. Program perbaikan gizi masyarakat; 22. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan; 23. Program peningkatan mutu pendidikan								



MISI 2	keagamaan di masyarakat								
	24. Program pembinaan kepemudaan;								
	25. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;								
	26. Program pengelolaan kebudayaan								
	27. Program penanganan fakir miskin;								
	28. Program perlindungan dan jaminan social								
	29. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga								
	30. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak								
	19. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis tanaman pangan;								
	20. Program peningkatan populasi dan produksi ternak								

<p>dan hasil ternak</p> <p>21. Program peningkatan ketahanan pangan;</p> <p>22. Program pengembangan perikanan</p> <p>23. Program pengembangan kepariwisataan</p> <p>24. Program pengembangan industry</p> <p>25. Program Pengembangan Perdagangan</p> <p>26. Program Peningkatan Iklim Investasi</p> <p>27. Program perluasan kesempatan kerja</p> <p>28. Program pengembangan koperasi dan UMKM</p> <p>29. Program penyelenggaraan jalan;</p> <p>30. Program penyelenggaraan jembatan;</p> <p>31. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;</p> <p>32. Program</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MISI 3	<p>pengembangan perumahan dan permukiman;</p> <p>33. Program penyelenggaraan tata ruang;</p> <p>34. Program pengelolaan lalu lintas dan parkir;</p> <p>35. Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup;</p> <p>36. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p> <p>14. Program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;</p> <p>15. Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik;</p> <p>16. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>17. Program peningkatan dan pengembangan</p>								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>18. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;</p> <p>19. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;</p> <p>20. Program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi</p> <p>21. Program pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, evaluasi dan informasi desa</p> <p>22. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;</p> <p>23. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil</p> <p>24. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;</p> <p>25. Program pengembangan wawasan kebangsaan</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	26. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Penjelasan	Pasal 15 UU 32 Tahun 2009/PP 46 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2						Nilai
			Perubahan Iklim	Kerusakan, kemerosotan dan atau	Peningkatan Intensitas dan cakupan	Penurunan mutu dan kelimpahan	Peningkatan Alih Fungsi kawasan	Peningkatan jumlah penduduk	

				kepunahan biodiversity	Wil. Banjir, longsor, kekeringan, dan atau kebakaran hutan dan lahan	SDA	hutan dan atau Lahan	miskin atau terancamnya keberlanjutan kehidupan sekelompok masyarakat	kesehatan dan keselamatan manusia	
	<b>INDIKASI RENCANA PROGRAM</b>									
	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>									
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kesehatan</b>									
3	Angka Harapan Hidup / AHH (Tahun)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
5	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

6	Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>									
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>									
8	Angka Kriminalitas		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
9	Cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran masih sangat rendah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
10	Peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Sosial</b>									

11	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
12	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
13	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
16	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pangan</b>									
17	Skor Pola Pangan Harapan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu



	<b>Bidang Pertanahan</b>									
18	Fasilitas pertanahan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>									
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
20	Sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir masih sangat rendah	Pembangunan TPA	- Pembangunan TPA akan member dampak pada perubahan iklim	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	- Dampak dari pembangu n akan menambah resiko bencana	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan TPA akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan
21	Meningkatnya pencemaran lingkungan air, udara (tutupan vegetasi/lahan)	Pembangunan IPAL	+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	+	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan

						kelimpahan SDA				
	<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
22	Indeks Infrastruktur masih rendah	Perlunya pembangunan infrastruktur	+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	+	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan
23	Masih relative tingginya bangunan yang belum ber IMB		+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	+	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan

						kelimpahan SDA				
24	Perlunya pengendalian penataan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Tenaga Kerja</b>									
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>									
26	Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
27	Prosentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP.EI)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
28	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

	<b>Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>									
29	Laju Pertumbuhan Penduduk		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perhubungan</b>									
30	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
31	Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>									
32	Nilai keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
33	Desa Terhubung Internet		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
34	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan public berbasis teknologi informasi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

35	Belum optimalnya integrasi system informasi daerah yang tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
36	Persentase koperasi aktif		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
37	Persentase UKM aktif		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
38	Belum optimalnya peran koperasi sebagai pelaku sektor riil		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
39	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Penanaman Modal</b>									
40	Laju Investasi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>									

41	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
42	Presentase prestasi olah raga		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Statistik</b>									
43	Ketersediaan dan keakuratan data makro dan mikro daerah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Persandian</b>									
44	Persandian dan keamanan informasi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kebudayaan</b>									
45	Pelestarian cagar budaya		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perpustakaan</b>									
46	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
47	Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi)		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

	<b>Bidang Kearsipan</b>									
48	Penerapan arsip secara baku		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>									
49	Tingkat konsumsi ikan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pariwisata</b>									
50	Pertumbuhan jumlah wisatawan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
51	Length of stay (lama tinggal wisatawan)	Pembangunan Destinasi Wisata, Pemeliharaan	+	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	+	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan
	<b>Bidang Pertanian</b>									
52	Produktifitas Komoditas Unggulan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
53	Produktifitas Ternak Sapi		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

54	Produktifitas Ternak Ayam Pedaging		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
55	Belum optimalnya pemasaran produk pertanian		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
56	Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perdagangan</b>									
57	Kontribusi sektor perdagangan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
58	Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan	Pembangunan pasar	- Pembangunan akan member dampak pada perubahan iklim	- Alih fungsi lahan untuk pembangunan akan menyebabkan penambahan kepunahan biodiversitas	- Dampak dari pembangunan akan menambah resiko bencana	- Pembangunan yang menggunakan material local akan menyebabkan bertambahnya permasalahan penurunan mutu dan kelimpahan SDA	- Pembangunan akan menambah permasalahan alih fungsi lahan	+	+	Signifikan
	<b>Bidang Perindustrian</b>									
59	Kontribusi sektor perindustrian		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu



60	Perlunya peningkatan nilai tambah komoditas pertanian unggulan di sektor industri		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Perencanaan</b>									
61	Perlunya mengoptimalkan integrasi sistem e-planning dan e-budgetting		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
62	Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>									
63	Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan	+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu	+
64	Belum adanya sumber daya manusia	+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu	+

	khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan									
	<b>Bidang Kepegawaian</b>									
65	Rasio ASN di Kabupaten Temanggung yang mengikuti diklat masih rendah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
66	Belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Keuangan</b>									
67	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Temanggung masih rendah		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
	<b>Bidang Pengawasan</b>									
68	belum semua aparatur pemeriksa bersertifikasi dan jumlah auditor yang masih sedikit		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

	<b>Bidang Lainnya</b>									
69	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2017 mendapatkan nilai CC		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
70	RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA tepat waktu sesuai prolegda		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
71	Pengesahan Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Prolegda pada setiap tahunnya		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
72	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas fasilitas publik		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu
73	Belum optimalnya bisnis proses birokrasi pelayanan publik		+	+	+	+	+	+	+	Tidak perlu

